



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

*Melayani Masyarakat Informasi Indonesia*



# **BUKU II**

## **MASTERPLAN SMART CITY**

### **KOTA KOTAMOBAGU**

#### **2023**



MASJID AGUNG  
BAITUL MAKMUR  
KOTAMOBAGU



**BUKU 2**  
**MASTERPLAN SMART CITY**  
**KOTA KOTAMOBAGU**



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**  
**2023**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
1.3. LANDASAN HUKUM.....	4
1.4. KERANGKA PIKIR.....	6
1.4.1. KOMPONEN <i>SMART CITY</i> .....	6
1.4.2. INDIKATOR <i>SMART CITY</i> .....	8
<b>BAB 2. ARAH PEMBANGUNAN <i>SMART CITY</i> DAERAH.....</b>	<b>26</b>
2.1. VISI, MISI, DAN SASARAN <i>SMART CITY</i> DAERAH .....	26
2.1.1. VISI PEMBANGUNAN <i>SMART CITY</i> .....	26
2.1.2. MISI PEMBANGUNAN <i>SMART CITY</i> .....	29
2.1.3. SASARAN PEMBANGUNAN <i>SMART CITY</i> KOTA KOTAMOBAGU....	30
2.2. INDIKATOR UTAMA <i>SMART CITY</i> DAERAH .....	32
2.2.1 INDIKATOR <i>SMART GOVERNANCE</i> .....	33
2.2.2 INDIKATOR <i>SMART BRANDING</i> .....	34
2.2.3 INDIKATOR <i>SMART ECONOMY</i> .....	35
2.2.4 INDIKATOR <i>SMART LIVING</i> .....	36
2.2.5 INDIKATOR <i>SMART SOCIETY</i> .....	37
2.2.6 INDIKATOR <i>SMART ENVIRONMENT</i> .....	38
<b>BAB 3. STRATEGI PEMBANGUNAN <i>SMART CITY</i> KOTA KOTAMOBAGU .....</b>	<b>40</b>
3.1. STRATEGI PEMBANGUNAN <i>SMART GOVERNANCE</i> .....	40
3.2. STRATEGI PEMBANGUNAN <i>SMART BRANDING</i> .....	42
3.3. STRATEGI PEMBANGUNAN <i>SMART ECONOMY</i> .....	43
3.4. STRATEGI PEMBANGUNAN <i>SMART LIVING</i> .....	44
3.5. STRATEGI PEMBANGUNAN <i>SMART SOCIETY</i> .....	45
3.6. STRATEGI PEMBANGUNAN <i>SMART ENVIRONMENT</i> .....	46
<b>BAB 4. RENCANA AKSI <i>SMART CITY</i> KOTA KOTAMOBAGU .....</b>	<b>47</b>
4.1. RENCANA AKSI <i>SMART GOVERNANCE</i> .....	48



4.2.	RENCANA AKSI <i>SMART BRANDING</i> .....	55
4.3.	RENCANA AKSI <i>SMART SOCIETY</i> .....	58
4.4.	RENCANA AKSI <i>SMART LIVING</i> .....	61
4.5.	RENCANA AKSI <i>SMART ECONOMY</i> .....	63
4.6.	RENCANA AKSI <i>SMART ENVIRONMENT</i> .....	65
<b>BAB 5.</b>	<b>PETA JALAN PEMBANGUNAN <i>SMART CITY</i> KOTA KOTAMOBAGU</b> .....	<b>67</b>
5.1.	PETA JALAN PEMBANGUNAN <i>SMART GOVERNANCE</i> .....	68
5.2.	PETA JALAN PEMBANGUNAN <i>SMART BRANDING</i> .....	77
5.3.	PETA JALAN PEMBANGUNAN <i>SMART SOCIETY</i> .....	79
5.4.	PETA JALAN PEMBANGUNAN <i>SMART LIVING</i> .....	81
5.5.	PETA JALAN PEMBANGUNAN <i>SMART ECONOMY</i> .....	83
5.6.	PETA JALAN PEMBANGUNAN <i>SMART ENVIRONMENT</i> .....	85
<b>BAB 6</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>87</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>88</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Dimensi, Subdimensi, dan Indikator <i>Smart City</i> menurut Kementerian Kominfo.....	9
Tabel 1. 2 Daftar 80 Indikator <i>Smart City</i> berdasarkan SNI ISO 37122:2019 .....	10
Tabel 2. 1 Indikator <i>Smart Governance</i> .....	33
Tabel 2. 2 Indikator <i>Smart Branding</i> .....	35
Tabel 2. 3 Indikator <i>Smart Economy</i> .....	36
Tabel 2. 4 Indikator <i>Smart Living</i> .....	36
Tabel 2. 5 Indikator <i>Smart Society</i> .....	37
Tabel 2. 6 Indikator <i>Smart Environment</i> .....	39
Tabel 3. 1 Sasaran dan Strategi Pembangunan <i>Smart Governance</i> .....	40
Tabel 3. 2 Sasaran dan Strategi Pembangunan <i>Smart Branding</i> .....	42
Tabel 3. 3 Sasaran dan Strategi Pembangunan <i>Smart Economy</i> .....	43
Tabel 3. 4 Sasaran dan Strategi Pembangunan <i>Smart Living</i> .....	44
Tabel 3. 5 Sasaran dan Strategi Pembangunan <i>Smart Society</i> .....	45
Tabel 3. 6 Sasaran dan Strategi Pembangunan <i>Smart Environment</i> .....	46
Tabel 4. 1 Rencana Aksi <i>Smart Governance</i> Kota Kotamobagu .....	48
Tabel 4. 2 Rencana Aksi <i>Smart Branding</i> Kota Kotamobagu.....	55
Tabel 4. 3 Rencana Aksi <i>Smart Society</i> Kota Kotamobagu .....	58
Tabel 4. 4 Rencana Aksi <i>Smart Living</i> Kota Kotamobagu .....	61
Tabel 4. 5 Rencana Aksi <i>Smart Economy</i> Kota Kotamobagu .....	63
Tabel 4. 6 Rencana Aksi <i>Smart Economy</i> Kota Kotamobagu .....	65
Tabel 5. 1 Peta Jalan <i>Smart Governance</i> Kota Kotamobagu .....	68
Tabel 5. 2 Peta Jalan <i>Smart Branding</i> Kota Kotamobagu .....	77
Tabel 5. 3 Peta Jalan <i>Smart Society</i> Kota Kotamobagu .....	79
Tabel 5. 4 Peta Jalan <i>Smart Living</i> Kota Kotamobagu .....	81
Tabel 5. 5 Peta Jalan <i>Smart Economy</i> Kota Kotamobagu .....	83
Tabel 5. 6 Peta Jalan <i>Smart Environment</i> Kota Kotamobagu .....	85



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Elemen <i>Smart City Readiness</i> .....	7
Gambar 1. 2 Dimensi <i>Smart City</i> .....	7
Gambar 1. 3 Diagram Kerangka Pikir Penyusunan <i>Masterplan Smart City</i> Kota Kotamobagu .....	25



**1**  
BAB

# PENDAHULUAN

Pada Bab pendahuluan akan dijabarkan secara singkat bagaimana latar belakang penyusunan masterplan *smart city* di Kota Kotamobagu, maksud dan tujuan dari penyusunan masterplan *smart city* Kota Kotamobagu, landasan hukum tersusunnya masterplan *smart city* Kota Kotamobagu, serta Kerangka Pikir dari proses penyusunan masterplan *smart city* Kota Kotamobagu.

## 1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang semakin canggih mengharuskan semua hal mengikuti kemajuan, kecanggihan dan memiliki inovasi supaya tidak tertinggal dengan zaman modern. Begitu juga dengan suatu kota yang dituntut untuk melakukan pembangunan, pembaharuan serta inovasi untuk meningkatkan daya saing perkotaan. Pembangunan suatu perkotaan memerlukan strategi dalam menyelesaikan permasalahan kota yang sedang terjadi. Dimana permasalahan suatu kota sangatlah kompleks. Mulai dari persoalan kemacetan hingga persoalan pelayanan terhadap masyarakat luas.

Berkaca dari beberapa negara yang berhasil mengatasi permasalahan perkotaan melalui inovasi dengan menerapkan sistem *Smart City*. Permasalahan baik sektor pelayanan publik, lingkungan, pariwisata, maupun ekonomi terselesaikan dengan kebijakan *Smart City*. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi dalam menerapkan kebijakan *Smart City*. Kombinasi antara teknologi dan kebijakan *Smart City* mampu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat, sehingga meminimalisir kesenjangan informasi, pelayanan yang berbelit-belit dan semakin memudahkan dalam mewujudkan kota cerdas.

*Smart City* merupakan suatu konsep pengembangan dan manajemen perkotaan dengan menggunakan teknologi mutakhir untuk mengelola kegiatan di daerah yang mampu memaksimalkan layanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan secara efektif dan efisien. *Smart city* dapat terealisasi apabila terdapat kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Kota Kotamobagu adalah salah satu Kabupaten/Kota yang tahun 2023 mendapatkan pendampingan berupa bimbingan teknis penyusunan *Masterplan Smart City*. Pemerintah kota Kotamobagu memiliki antusiasme yang tinggi dalam menerapkan konsep *smart city* di



wilayahnya. Semua organisasi perangkat daerah (OPD) terlibat dalam kegiatan bimbingan teknis Penyusunan *Masterplan Smart City* Kota Kotamobagu melalui metode perencanaan partisipatif. Metode ini melibatkan OPD secara aktif dalam tugas mereka untuk mengidentifikasi potensi dan masalah saat ini serta mengusulkan program inovasi yang efektif, efisien, dan terukur. Bimbingan teknis empat kali diberikan selama kegiatan, dan hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan merumuskan program dan rencana aksi *Smart City* dengan semua OPD yang terlibat
- Peta Jalan (*Roadmap*) pembangunan *Smart City* selama 10 (sepuluh) tahun ke depan dapat tersusun
- Terbentuknya dokumen *Masterplan Smart City* yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan kota
- Melakukan bersama-sama komitmen untuk melaksanakan program dan rencana aksi yang telah tersusun agar target pembangunan *Smart City* dapat terwujud
- Dokumen *Masterplan Smart City* menjadi sebuah manfaat bagi pemerintah dan masyarakat tidak hanya menjadi dokumen perencanaan.

Konsep *smart city* ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk isu-isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah Kota Kotamobagu. Isu-isu strategis Kota Kotamobagu diantaranya kurangnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan yang ditandai dengan masih tingginya permasalahan kesehatan, seperti angka kematian ibu, bayi dan balita, penyebaran virus HIV/AIDS, TB Paru, Gizi Buruk dan DBD. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya pemerataan tenaga kesehatan dan keterjangkauan sarana pelayanan kesehatan yang kurang merata.

Isu strategis lainnya yaitu kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran masih merupakan isu pokok yang dihadapi Kota Kotamobagu. Keadaan sampai tahun 2017 masih terdapat 7,308 Jiwa penduduk miskin atau sebesar 5.9 % dan 4.55 % Orang angkatan kerja yang dikategorikan sebagai pengangguran terbuka. Isu strategis Kota Kotamobagu lainnya tentang tata kelola pemerintah dan reformasi birokrasi. Sejak tahun 2016 telah dirintis tata kelola perencanaan dan penganggaran Kota Kotamobagu yang terintegrasi berbasis IT. Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kepuasan layanan kepada masyarakat. Namun hal ini tetap menyisakan berbagai kendala. Terkait dengan transparansi anggaran, diketahui bahwa Kota Kotamobagu termasuk daerah yang masih belum transparan, baik dalam proses pembahasan maupun penetapan APBD. Pada proses pembahasan APBD Kota



Kotamobagu belum memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam prosesnya. Demikian juga setelah APBD ditetapkan, masyarakat tidak memiliki akses untuk mengetahui belanja dan pendapatan pemerintah.

Salah satu agenda pembangunan nasional dan daerah adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Saat ini Pemerintah Kota Kotamobagu telah melakukan beberapa hal yaitu melakukan persiapan dan pemanfaatan TIK dalam internal pemerintah agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan isu-isu di atas, diharapkan *masterplan smart city* Kota Kotamobagu dapat menjadi panduan daerah dalam pelaksanaan pembangunan berbasis *smart city* dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun ke depan. Buku 2 *masterplan smart city* Kota Kotamobagu ini berisi tentang bab I, pendahuluan yang menjelaskan maksud dan tujuan disusunnya *masterplan smart city* Kota Kotamobagu, kerangka pikir yang terdiri dari komponen *smart city* dan indikator *smart city*. Kemudian pada bab II menjelaskan tentang arah pembangunan *smart city* daerah yang isinya membahas tentang visi, misi, sasaran serta indikator utama *smart city* daerah. Selanjutnya di bab III membahas tentang strategi pembangunan, bab IV membahas tentang rencana aksi, dan bab V membahas tentang peta jalan pembangunan *smart city* Kota Kotamobagu. Bagian terakhir pada buku 2 *masterplan smart city* Kota Kotamobagu ini ditutup dengan bab penutup. Penyusunan buku 2 dibagi menjadi 2 bagian. Bagian 1 berisi mulai dari pendahuluan hingga strategi pembangunan *smart city*. Sedangkan bagian 2 berisi tentang rencana aksi hingga penutup.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

*Masterplan Smart City* merupakan wadah dari berbagai macam permasalahan perkotaan pada saat ini yang dapat memberikan manfaat secara langsung untuk perkembangan di suatu daerah. *Masterplan Smart City* juga memuat indikator, program dan kegiatan yang berfungsi sebagai suatu perencanaan implementasi yang terintegrasi & komprehensif. *Masterplan* ini juga turut berperan dalam membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan, peraturan, serta arah dan prioritas pembangunan kota.

Maksud penyusunan *Masterplan Smart City* Kota Kotamobagu adalah sebagai pedoman untuk pemkot dan tim pelaksana *Smart City* dalam menerapkan program *Smart City*



di Kota Kotamobagu dalam rentang waktu 10 tahun. Adanya buku ini juga dimaksudkan agar program inovasi dan kolaborasi yang sudah disusun secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan Kota Kotamobagu dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

Proses pembangunan *smart city* merupakan rangkaian proses yang membutuhkan waktu dan komitmen serta kerjasama dari semua pihak. Proses ini melibatkan semua pihak dari tingkat daerah hingga ke tingkat pusat, dari pemerintah, swasta, dan tentu saja masyarakat di dalamnya. Buku 2 ini berisi analisis strategis *smart city* di Kota Kotamobagu yang selanjutnya menjadi dasar untuk menyusun masterplan *smart city* Kota Kotamobagu dan rencana *quickwins smart city* Kota Kotamobagu. Adapun tujuan disusunnya Buku 2 ini adalah

- Tersedianya arah pembangunan *smart city* yang terdiri dari visi dan misi *smart city*, adanya strategi pembangunan *smart city* kemudian didapatkannya rencana aksi daerah, peta jalan *smart city* yang tajam dan komprehensif.
- Menyelaraskan program dan kegiatan *smart city* Kota Kotamobagu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan program kegiatan OPD yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD.

### 1.3. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;



12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
20. Nota Kesepakatan Antara Ditjen Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan 48 Kepala Daerah Tahun 2021 Tentang Implementasi Program Kota Cerdas (*Smart City*) Kota/ Kabupaten Pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional dan Kawasan Ibu kota Negara Baru;
21. SNI ISO 37120:2018 tentang pembangunan Perkotaan dan Masyarakat yang Berkelanjutan – Indikator-Indikator untuk Layanan Perkotaan dan Kualitas Hidup; dan
22. SNI ISO 31712:2019 tentang Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan – Indikator untuk kota cerdas
23. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu 2014-2034



24. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pemabngunan Jangka Panjang Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2005 -2025
25. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023

#### **1.4. KERANGKA PIKIR**

##### **1.4.1. KOMPONEN *SMART CITY***

Dalam membangun *smart city*, terlebih dahulu suatu kota/kabupaten harus memiliki kesiapan di daerahnya. Terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan *smart city* (*smart city readiness*), yaitu: potensi alam (*nature*), struktur daerah (*structure*), infrastruktur (*infrastructure*), suprastruktur (*suprastructure*), dan budaya (*culture*).

##### **A. Elemen *Smart City***

###### **a. Nature**

Pembangunan potensi dan kondisi alam yang dimiliki oleh suatu daerah untuk mendukung *smart city*.

###### **b. Struktur**

Pembangunan sumber daya manusia pelaksana dan penerima manfaat *smart city*, penyiapan anggaran, dan sumber daya tata Kelola, serta tata pamong.

###### **c. Infrastruktur**

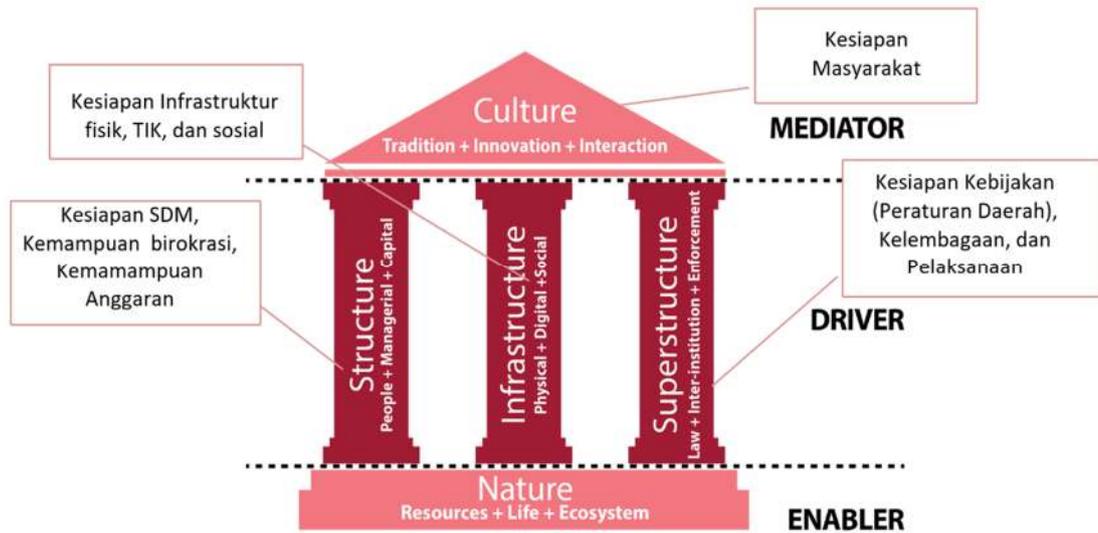
Pembangunan infrastruktur pendukung *Smart City* yang meliputi infrastruktur fisik, digital atau TIK, serta infrastruktur sosial untuk kepentingan umum.

###### **d. Suprastruktur**

Penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata laksana pelaksanaan pembangunan *smart city*.

###### **e. Culture**

Pengembangan kebudayaan yang dimiliki oleh pemerintah di suatu daerah sebagai nilai-nilai sejarah yang telah ada secara turun-temurun.

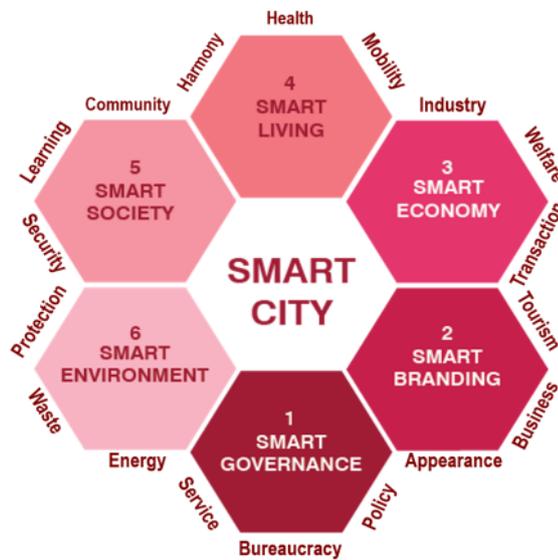


**Gambar 1. 1** Elemen *Smart City Readiness*

Sumber: Paparan “Guideline Masterplan Smart City Kominfo”

**B. Dimensi *Smart City***

Kerangka pikir *smart city* berikutnya adalah dimensi-dimensi yang terdapat di dalam *smart city* itu sendiri. Keenam jenis pembagian *smart city* tersebut meliputi *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*, *smart society*, dan *smart environment*.



**Gambar 1. 2** Dimensi *Smart City*

Sumber: Pedoman penyusunan Masterplan Smart City oleh Kementerian Kominfo



1. **Smart Governance**, berfokus pada peran pemerintah sebagai fasilitator pengembangan *smart city*. Indikator ini tidak jarang dikaitkan dengan peraturan pemerintah untuk mendukung aktivitas warganya, termasuk peraturan yang dibuat untuk membantu mengembangkan usaha masyarakat.
2. **Smart Branding**, berpusat pada inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. Beberapa cara untuk mencapai indikator ini diantaranya membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*tourism branding*), membangun *platform* dan memasarkan ekosistem bisnis daerah (*business branding*), membangun dan memasarkan wajah kota (*city appearance branding*).
3. **Smart Economy**, berfokus pada kerja sama pemerintah dan masyarakat supaya mampu menarik investor untuk pengembangan kota atau daerah. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan adanya lapangan kerja baru untuk masyarakat usia produktif merupakan program-program yang dapat direalisasikan berdasarkan indikator ini.
4. **Smart Living**, berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dapat dicirikan dengan semakin mudahnya akses menuju fasilitas kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur penunjang lainnya.
5. **Smart Society**, berfokus pada peningkatan kualitas masyarakat atau sumber daya manusia. Beberapa cara untuk mencapai indikator ini diantaranya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang tinggal di daerah sasaran program *Smart City* dan mewujudkan sistem keamanan masyarakat (*security*).
6. **Smart Environment**, berfokus pada manajemen sumber daya alam dan penggunaan energi alternatif yang berfungsi untuk pengurangan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Program-program yang dapat direalisasikan berdasarkan indikator ini diantaranya manajemen penggunaan air bersih serta manajemen pengelolaan sampah

#### 1.4.2. INDIKATOR SMART CITY

Indikator *Smart City* merupakan komponen penilai dari keenam dimensi *Smart City*, yaitu *Smart Governance*, *Smart branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan



*Smart Environment*. Keenam dimensi tersebut kemudian diuraikan kembali menjadi 17 (tujuh belas) sub dimensi dimana setiap sub dimensi tersebut memiliki indikator-indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Masterplan *Smart City* oleh Kementerian Kominfo. Berikut merupakan detail dari tabel dimensi dan sub-dimensi, serta indikator *smart city* menurut Kementerian Kominfo.

**Tabel 1. 1**

**Dimensi, Subdimensi, dan Indikator *Smart City* menurut Kementerian Kominfo**

DIMENSI	SUBDIMENSI	INDIKATOR <i>SMART CITY</i>
<b>SMART GOVERNMENT</b>	Pelayanan Publik ( <i>Public Service</i> )	Pelayanan Administrasi
		Penyediaan Kebutuhan Bahan Pokok
		Penyediaan Kebutuhan Jasa Pokok
	Manajemen Birokrasi yang Efisien ( <i>Bureaucracy</i> )	Keadilan
		Bertanggung Jawab
		Keterbukaan
	Efisien Kebijakan Publik ( <i>Public Policy</i> )	Aspirasi Masyarakat ( <i>Bottom Up</i> )
		Memberikan Dampak Positif
		Dapat Diakses Masyarakat
<b>SMART BRANDING</b>	<i>Tourism Branding</i> (Ekosistem Pariwisata)	Destinasi wisata yang layak bagi wisatawan
		Infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan
		Budaya Ramah Pengunjung
	<i>Bussines Branding</i> (Ekosistem Bisnis Daerah)	Ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman
		Produk dan jasa industri kreatif daerah
		Ekosistem investasi yang mudah dan efektif
	<i>City Appearance Branding</i> (Wajah Kota)	Tata ruang dan tata wilayah kota yang indah
		Membangun Wilayah Batas ( <i>Edge</i> )
		Penanda Lokasi Penting ( <i>Landmark</i> )
Penyediaan Navigasi Kota ( <i>Signage</i> )		
<b>SMART ECONOMY</b>	Ekosistem industri yang berdaya saing	Integrasi industri Primer, Industri sekunder dan industri tersier
	Kesejahteraan Rakyat	Pendapatan rumah tangga
		Penyerapan angkatan kerja
		Pemberdayaan ekonomi masyarakat
	Ekosistem Transaksi Keuangan	Keuangan Digital
		Masyarakat yang bankable
ekosistem ekonomi digital		
<b>SMART LIVING</b>	Prasarana Kesehatan	Makanan & Minuman Sehat
		Pelayanan Kesehatan
		Sarana Prasarana Olahraga
	Harmonisasi Tata Ruang	Permukiman
		Pusat Kegiatan Bisnis
		Fasilitas Rekreasi
	Sanaran Transportasi	Individual
Publik		



DIMENSI	SUBDIMENSI	INDIKATOR <i>SMART CITY</i>
		Logistik
<b>SMART SOCIETY</b>	Interaksi Masyarakat yang Efisien ( <i>Community</i> )	Individual
		Digital
	Ekosistem Belajar yang Efisien ( <i>Learning</i> )	Formal
		Informal
		Inklusif
	Sistem Keamanan Masyarakat ( <i>Security</i> )	Keselamatan Jiwa
Keselamatan Properti		
Resiko Bencana		
<b>SMART ENVIRONMENT</b>	Program Proteksi Lingkungan ( <i>Protection</i> )	Tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara
		Ruang Terbuka hijau
		Restorasi Sungai
		Polusi Udara
	Tata Kelola Sampah dan limbah	Tata kelola limbah atau sampah rumah tangga
		Tata kelola limbah industri
		Tata kelola limbah dan sampah publik
		Keseimbangan ekosistem lingkungan
	Tata Kelola Energi	Energi yang efisien dan bertanggungjawab
		Energi alternatif yang ramah lingkungan

Sumber: Pedoman Penyusunan Masterplan Smart City Kementerian Kominfo

Selain indikator yang berdasarkan pada Pedoman Penyusunan *Masterplan Smart City* oleh Kementerian Kominfo di atas, penyusunan *Masterplan Smart City* Kota Kotamobagu juga mengacu pada indikator *Smart City* oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) melalui SNI ISO 37122:2019 (Indikator Kota Cerdas). Berikut merupakan daftar 80 indikator *Smart City* berdasarkan SNI ISO 37122:2019.

**Tabel 1. 2**

**Daftar Indikator *Smart City* berdasarkan SNI ISO 37122:2019**

KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR	PERSYARATAN	SUMBER DATA
5. Ekonomi	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka.	Dihitung dengan cara jumlah total kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang berisi kebijakan data terbuka (pembilang) dibagi dengan jumlah total kontrak layanan di kota (penyebut).	Data yang berasal dari kontrak layanan harus bersumber dari lembaga perkotaan yang terkait, atau perusahaan riset pasar dan perusahaan survei.
	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Dihitung dengan cara tingkat kelangsungan hidup bisnis baru di kota (pembilang) dibagi dengan 1/100.000 dari total populasi kota (penyebut).	Data bisnis baru harus diperoleh melalui Lembaga perkotaan atau kementerian terkait yang mengawasi persetujuan lisensi bisnis baru atau pendaftaran bisnis baru.



KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR	PERSYARATAN	SUMBER DATA
	5.3. Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Dihitung dengan cara jumlah penduduk kota yang bekerja di sektor TIK (pembilang) dibagi dengan total tenaga kerja kota (penyebut).	Data tentang ketenagakerjaan oleh industri harus diperoleh melalui survei angkatan kerja atau penilaian pekerjaan kota yang dikelola oleh otoritas/badan statistik lokal, regional atau nasional, atau Kementerian atau Departemen Ketenagakerjaan.
	5.4. Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan	Dihitung dengan cara jumlah penduduk kota yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan (pembilang) dibagi dengan total tenaga kerja kota kekuatan (penyebut).	Data tentang ketenagakerjaan oleh industri harus diperoleh melalui survei tenaga kerja atau penilaian pekerjaan kota yang dikelola oleh otoritas/badan statistik lokal, regional atau nasional, atau Kementerian atau Departemen Ketenagakerjaan.
6. Pendidikan	6.1. Persentase populasi kota dengan kecakapan profesional di lebih dari satu bahasa	Dihitung dari jumlah total orang yang dapat berkomunikasi dalam lebih dari satu bahasa asing dengan kemahiran profesional (pembilang) dibagi dengan total populasi kota (penyebut).	Data tentang bahasa asing yang diucapkan oleh populasi kota harus bersumber menggunakan data sensus, atau lokal, survei regional atau nasional yang berkaitan dengan bahasa yang digunakan.
	6.2. Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa	Dihitung sebagai jumlah total komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya dengan akses Internet tersedia untuk siswa sekolah dasar dan lanjutan yang menghadiri sekolah dasar dan sekolah lanjutan di kota (pembilang) dibagi dengan 1/1.000 dari total populasi sekolah dasar dan lanjutan (penyebut)	Data tentang jumlah perangkat elektronik dengan akses internet harus bersumber dari pimpinan sekolah setempat, atau Kementerian atau Departemen Pendidikan.



KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR	PERSYARATAN	SUMBER DATA
	6.3. Jumlah tingkat pendidikan tinggi sains, teknologi, teknik dan matematika (STEM) per 100.000 penduduk	Dihitung sebagai jumlah orang yang memegang gelar pendidikan tinggi dengan spesialisasi atau jurusan disiplin dalam subjek STEM (pembilang) dibagi dengan 1/100.000 dari total populasi kota (penyebut).	Data tentang tingkat pendidikan yang lebih tinggi menurut subjek harus bersumber dari perguruan tinggi setempat/ institusi yang mengeluarkan sertifikat diploma, atau Kementerian atau lembaga perkotaan terkait Pendidikan atau data survey.
7. Energi	7.1. Persentase energi listrik dan energi termal yang dihasilkan dari pengolahan air limbah, limbah padat dan pengolahan limbah cair lainnya serta sumber daya limbah panas lainnya, sebagai bagian dari total bauran energi kota untuk tahun Tertentu	Dihitung dari jumlah total energi listrik dan termal energi yang dinyatakan dalam GJ (Gigajoule) yang dihasilkan dari pengolahan air limbah, limbah padat, dan pengolahan limbah cair lainnya serta sumber panas limbah lainnya (pembilang) dibagi dengan total permintaan energi pengguna akhir kota dalam unit yang sama dengan pembilang (GJ).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah terkait atau kementerian yang mengawasi hal tersebut, serta dari regulator dan penyedia jasa utilitas lokal.
	7.2. Energi listrik dan termal (GJ) yang dihasilkan dari pengolahan air limbah per kapita per tahun	Dihitung dengan cara jumlah total energi listrik dan termal yang dinyatakan dalam GJ yang dihasilkan dari pengolahan air limbah di kota (pembilang) dibagi dengan total populasi kota (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah terkait atau kementerian yang mengawasi hal tersebut, serta dari regulator dan penyedia jasa utilitas lokal.
	7.3. Energi listrik dan panas (GJ) dihasilkan dari limbah padat atau pengolahan limbah cair per kapita per tahun	Dihitung sebagai jumlah total energi listrik dan termal yang dinyatakan dalam GJ yang dihasilkan dari limbah padat dan pengolahan limbah cair lainnya di kota (pembilang) dibagi dengan total populasi kota (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah terkait atau kementerian yang mengawasi hal tersebut, serta dari regulator dan penyedia jasa utilitas lokal.



KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR	PERSYARATAN	SUMBER DATA
	7.4. Persentase listrik kota yang diproduksi menggunakan sistem produksi listrik desentralisasi	Dihitung dengan cara jumlah listrik yang dihasilkan oleh sistem / fasilitas produksi listrik terdesentralisasi dalam GJ (pembilang) dibagi dengan jumlah total listrik yang dikonsumsi di perkotaan dalam satuan yang sama sebagai pembilang (GJ) (penyebut).	Bersumber dari utilitas lokal, dan organisasi perangkat daerah terkait atau kementerian terkait yang mengawasi produksi energi.
	7.5. Kapasitas penyimpanan jaringan energi kota per total konsumsi energi kota	Dihitung dengan cara jumlah total energi yang dapat disimpan setiap tahun di jaringan listrik dan jaringan termal perkotaan (skema pemanas dan pendingin lokus area) dalam gigajoule (GJ) (pembilang) dibagi oleh total konsumsi energi perkotaan (penyebut).	Bersumber dari lembaga perkotaan atau kementerian terkait yang mengawasi jaringan energi perkotaan, dan utilitas lokal yang mengoperasikan skema pemanasan dan pendinginan distrik.
	7.6. Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu	Dihitung dengan cara jumlah titik cahaya yang dapat dikontrol oleh sistem manajemen kinerja cahaya (pembilang) dibagi dengan jumlah total titik cahaya di kota (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah atau kementerian yang bertanggung jawab atas inventarisasi penerangan jalan dan manajemen lampu jalan.
	7.7. Persentase penerangan jalan yang telah dipugar dan yang baru dipasang	Dinyatakan dengan cara jumlah titik lampu yang diperbaharui dan dipasang baru (pembilang) dalam tahun dibagi dengan jumlah total titik cahaya (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah atau kementerian yang bertanggung jawab atas inventaris penerangan jalan.
	7.8. Persentase bangunan umum yang membutuhkan renovasi/perbaikan	Dihitung dengan cara meter persegi dari bangunan publik yang membutuhkan renovasi/perbaikan (pembilang), dibagi dengan total meter persegi bangunan umum (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah, kementerian atau lembaga yang mengawasi bangunan dan pemeliharaan bangunan di kota.
	7.9. Persentase bangunan di kota dengan pengukur energi cerdas	Dihitung dengan cara jumlah bangunan di kota dengan meteran energi cerdas (pembilang) dibagi dengan jumlah total bangunan di kota (penyebut).	Bersumber dari penyedia energi lokal atau regional, atau organisasi perangkat daerah atau kementerian terkait yang memiliki data pada meter energi pintar setempat.



KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR	PERSYARATAN	SUMBER DATA
	7.10. Jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik per kendaraan listrik terdaftar	Dihitung dengan cara jumlah total stasiun pengisian kendaraan listrik di kota (pembilang) dibagi dengan jumlah total kendaraan listrik terdaftar di kota (penyebut).	Diperoleh dari lembaga perkotaan atau negara bagian atau kementerian yang bertanggung jawab untuk transportasi dan registrasi kendaraan di kota.
8. Lingkungan dan perubahan iklim	8.1. Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau	Dihitung dengan cara jumlah total bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau (pembilang) dibagi dengan jumlah total kota bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah dan kementerian yang mengawasi pembangunan dan pemeliharaan bangunan di kota, atau mengawasi izin dan standar bangunan.
	8.2. Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara jarak jauh secara langsung (real-time) per kilometer persegi (km <sup>2</sup> )	Dihitung dengan cara jumlah total stasiun pemantauan kualitas udara jarak jauh secara nyata di kota (pembilang) dibagi dengan luas lahan kota (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah atau kementerian yang mengawasi kualitas udara kota
	8.3. Persentase bangunan umum yang dilengkapi untuk memantau kualitas udara dalam ruangan	Dihitung dengan cara jumlah total bangunan publik di dalam kota yang dilengkapi untuk memantau kualitas udara dalam ruangan (pembilang) dibagi dengan jumlah total bangunan di kota (penyebut).	Diperoleh dari otoritas setempat, pejabat, atau Kementerian atau Departemen yang bertanggung jawab atas bangunan publik.
9. Keuangan	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri	Dinyatakan sebagai jumlah total dana yang dikumpulkan per tahun dari biaya izin, biaya pengguna, biaya lisensi dan pajak sebagaimana diizinkan oleh undang-undang atau undang-undang dari ekonomi berbagi transaksi (pembilang) dibagi dengan total pendapatan asli daerah (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah atau kementerian terkait yang mengawasi keuangan kota.
	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	Dihitung sebagai jumlah pembayaran ke kota yang dilakukan secara elektronik berdasarkan e-faktur (pembilang) dibagi dengan jumlah total pembayaran yang dilakukan ke kota (penyebut).	Bersumber dari departemen ekonomi di kota atau dari departemen kota lain yang bertanggung jawab untuk pembayaran.



KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR	PERSYARATAN	SUMBER DATA
10. Pemerintahan	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Dihitung sebagai jumlah total kunjungan portal data terbuka kota (pembilang) dibagi dengan 1/100.000 dari total populasi kota (penyebut).	Diperoleh dari situs web hosting statistik yang diperoleh dari administrasi situs web kota atau disediakan oleh host domain.
	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Dihitung sebagai jumlah total layanan kota yang ditawarkan kepada orang-orang dan bisnis melalui antarmuka Internet yang terpusat (pembilang) dibagi dengan jumlah total layanan kota yang ditawarkan oleh kota (penyebut).	Bersumber dari departemen kota atau lembaga yang menyediakan layanan.
	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Dinyatakan sebagai jumlah total jam dari panggilan awal / pengajuan formulir yang diambil untuk menanggapi semua pertanyaan yang dibuat melalui sistem nondarurat kota (pembilang) dibagi dengan jumlah total pertanyaan yang diterima oleh sistem nondarurat kota (penyebut).	Bersumber dari catatan yang disimpan oleh sistem penyelidikan non-darurat dan departemen kota terkait dikirim untuk menjawab pertanyaan.
	10.4. Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi (TI) kota	Dihitung sebagai jumlah jam ketika infrastruktur TI kota tidak tersedia karena insiden (missal pemadaman sistem listrik, pemeliharaan terjadwal) (pembilang) dibagi dengan jumlah total insiden yang menyebabkan Pemadaman infrastruktur TI (penyebut).	Bersumber dari departemen kota dan respons kementerian terkait untuk infrastruktur TI
11. Kesehatan	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	Dihitung sebagai jumlah total orang dengan file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh semua jenis penyedia layanan kesehatan (pembilang) dibagi dengan total populasi di kota (penyebut).	Bersumber dari penyedia atau asuransi kesehatan lokal, kota, kabupaten atau provinsi, atau departemen dan kementerian terkait



KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR	PERSYARATAN	SUMBER DATA
	11.2. Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk	Dihitung sebagai jumlah total janji temu medis yang dilakukan melalui jarak jauh, seperti melalui layanan video daring atau telekonferensi (pembilang) dibagi dengan 1/100.000 dari total populasi kota (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah, departemen atau kementerian yang mengawasi perawatan kesehatan yang diberikan kepada orang-orang kota dan melacak pola perawatan Kesehatan yang diberikan kepada warganya.
	11.3. Persentase populasi kota yang memiliki akses ke sistem peringatan public langsung (real-time) untuk saran kualitas udara dan air	Dihitung sebagai jumlah orang dengan akses ke sistem peringatan publik langsung (real-time) untuk saran kualitas udara dan air (pembilang) dibagi dengan total populasi kota.	Bersumber dari departemen kota terkait yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem peringatan
12. Perumahan	12.1. Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar	Dihitung sebagai jumlah total rumah tangga dengan pengukur energi pintar (pembilang) dibagi dengan jumlah total rumah tangga di kota (penyebut).	Bersumber dari penyedia energi lokal atau regional, atau departemen atau kementerian kota terkait yang memiliki data meter energi pintar setempat.
	12.2. Persentase rumah tangga dengan pengukur air pintar	Dihitung sebagai jumlah total rumah tangga dengan meteran air pintar (pembilang) dibagi dengan jumlah total rumah tangga di kota (penyebut).	Bersumber dari penyedia air lokal atau regional, atau kota terkait departemen atau kementerian yang menyimpan data pada meteran air pintar setempat.
13. Populasi dan kondisi sosial	13.1. Persentase bangunan publik yang dapat diakses oleh orang-orang dengan kebutuhan khusus	Dihitung dengan cara jumlah bangunan publik di dalam kota yang dapat diakses oleh orang-orang dengan kebutuhan khusus (pembilang) dibagi dengan jumlah total bangunan umum di kota (penyebut).	Diperoleh dari otoritas setempat, pejabat, atau Kementerian atau Departemen yang bertanggung jawab atas bangunan umum



KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR	PERSYARATAN	SUMBER DATA
	13.2. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus	Dihitung dengan jumlah dari biaya penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi bantuan yang dihabiskan kota dalam satu tahun fiskal (pembilang) dibagi dengan total anggaran kota yang dialokasikan untuk tahun tertentu (penyebut).	Bersumber dari anggaran kota dan dokumen keuangan yang diaudit, atau departemen atau kementerian yang mengawasi pengeluaran kota untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat dan teknologi bantuan untuk warga negara dengan kebutuhan khusus.
	13.3. Persentase penyeberangan pejalan kaki yang ditandai dilengkapi dengan sinyal pejalan kaki yang dapat diakses	Dihitung sebagai jumlah penyeberangan pejalan kaki yang ditandai dilengkapi dengan sinyal pejalan kaki yang dapat diakses (pembilang) dibagi dengan jumlah total penyeberangan pejalan kaki yang ditandai (penyebut).	Bersumber dari departemen kota atau kementerian yang mengawasi jalur umum dan sinyal lalu lintas.
	13.4. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital	Dihitung sebagai jumlah pengeluaran tahunan kota untuk pemrograman yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan digital (pembilang) dibagi dengan total anggaran tahunan kota (penyebut).	Bersumber dari anggaran kota.
14. Rekreasi	14.1. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Dihitung dengan cara jumlah layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring (pembilang) dibagi dengan jumlah total layanan rekreasi publik yang ditawarkan oleh sebuah kota (penyebut).	Bersumber dari departemen kota atau kementerian terkait yang mengawasi rekreasi publik, atau departemen yang bertanggung jawab atas administrasi daring.
15. Keamanan	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	Dihitung dengan cara jumlah area lahan kota yang dicakup oleh kamera pengintai video digital dalam kilometer persegi (pembilang) dibagi dengan total luas lahan kota (penyebut).	Bersumber dari penegakan hukum setempat dan departemen keselamatan, kementerian atau Lembaga.
16. Limbah Padat	16.1. Persentase pusat pembuangan limbah (kontainer) yang dilengkapi dengan telemetering	Dihitung dengan cara jumlah pusat pembuangan limbah (kontainer) untuk pembuangan sampah yang dilengkapi dengan perangkat telemetering (pembilang) dibagi dengan total pusat pembuangan limbah (wadah) di dalam kota (penyebut).	Bersumber dari departemen kota yang mengawasi pusat pembuangan sampah / limbah



KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR	PERSYARATAN	SUMBER DATA
	16.2. Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga	Dihitung dengan jumlah orang yang tinggal di kota di mana ada pengumpulan sampah rumah tangga dari pintu ke pintu yang dilengkapi dengan perangkat pemantauan (pembilang) dibagi dengan total populasi kota (penyebut).	Bersumber dari dinas terkait yang mengawasi layanan pengumpulan sampah dan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu.
	16.3. Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilkan energi	Dihitung dengan cara jumlah total limbah yang digunakan untuk menghasilkan energi (pembilang) dibagi dengan jumlah total limbah yang dihasilkan di kota (penyebut).	Diperoleh dari indikator ISO 37120 "pengumpulan limbah padat per kapita kota" dikalikan dengan populasi kota.
	16.4. Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota	Dihitung dengan cara jumlah total plastik yang keluar dari pabrik pemilahan dan daur ulang (pembilang) dibagi dengan jumlah total plastik di pasar dalam batas kota (penyebut).	Bersumber dari utilitas lokal, organisasi perangkat daerah terkait yang mengawasi pengolahan limbah.
	16.5. Persentase tempat sampah umum yang merupakan tempat sampah umum yang difungsikan dengan sensor	Dihitung dengan cara jumlah tempat sampah umum yang diaktifkan oleh sensor (pembilang) dibagi dengan jumlah total tempat sampah umum di kota (penyebut).	Diperoleh dari organisasi perangkat daerah terkait yang bertanggung jawab atas limbah kota atau perusahaan / perusahaan sampah kota primer.
	16.6. Persentase limbah listrik dan elektronik kota yang didaur ulang	Dihitung dengan cara jumlah total limbah listrik dan elektronik kota yang didaur ulang dalam ton (pembilang) dibagi dengan jumlah total limbah listrik dan elektronik yang dihasilkan di kota dalam ton (penyebut).	Bersumber dari departemen kota yang bertanggung jawab atas limbah padat kota atau perusahaan / perusahaan limbah padat kota.
17. Olahraga dan budaya	17.1. Jumlah pemesanan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk	Dihitung dengan jumlah pemesanan daring untuk fasilitas budaya (pembilang) dibagi dengan 1/100.000 dari total populasi kota (penyebut).	Bersumber dari kementerian dan departemen terkait yang bertanggung jawab untuk fasilitas dan pusat budaya
	17.2. Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan	Dihitung sebagai jumlah catatan budaya kota yang telah didigitalkan (pembilang) dibagi dengan jumlah total catatan budaya kota (penyebut)	Bersumber dari arsip kota yang relevan, atau departemen dan kementerian terkait.



KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR	PERSYARATAN	SUMBER DATA
	17.3. Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk	Dihitung dengan cara jumlah total judul buku perpustakaan dan jumlah total judul buku elektronik perpustakaan (pembilang) dibagi dengan 1/100.000 dari total populasi kota (penyebut).	Bersumber dari perpustakaan setempat, papan perpustakaan atau departemen kota terkait, atau melalui kementerian.
	17.4. Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif	Dihitung dengan cara jumlah total penduduk kota yang merupakan pengguna perpustakaan aktif yang diukur sebagai warga negara yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan umum atau diukur menggunakan layanan perpustakaan (pembilang) dibagi dengan total populasi kota (penyebut).	Bersumber dari perpustakaan setempat, papan perpustakaan atau departemen kota terkait, atau melalui kementerian.
18. Telekomunikasi	18.1. Persentase populasi kota dengan akses ke pita lebar (broadband) berkecepatan memadai	Dihitung dengan cara jumlah total orang di kota yang memiliki akses ke pita lebar (pembilang) yang berkecepatan memadai dibagi dengan total populasi kota (penyebut).	Bersumber dari penyedia layanan pita lebar lokal, departemen atau kementerian terkait, atau perusahaan yang mengawasi layanan pita lebar.
	18.2. Persentase area kota di bawah zona putih / titik mati / tidak tercakup oleh konektivitas telekomunikasi	Dihitung sebagai total area lahan kota yang diklasifikasikan dengan cara di bawah zona putih / titik mati / tidak tercakup oleh konektivitas telekomunikasi dalam kilometer persegi (pembilang) dibagi dengan luas lahan total kota dalam kilometer persegi (penyebut).	Bersumber dari penyedia layanan Internet lokal, atau organisasi perangkat daerah atau kementerian terkait yang mengawasi pembangunan infrastruktur Telekomunikasi.
	18.3. Persentase area kota yang dicakup oleh konektivitas Internet yang disediakan oleh kota	Dihitung sebagai total luas lahan perkotaan yang dilayani dengan konektivitas Internet dalam kilometer persegi (pembilang) dibagi dengan total luas kota kota dalam kilometer persegi (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab atas teknologi informasi dan mengelola rasio internet yang dapat diakses publik, atau yang dapat diperkirakan dengan menggunakan alat GIS.



KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR	PERSYARATAN	SUMBER DATA
19. Transportasi	19.1. Persentase jalan umum dan jalan berbayar yang dicakup oleh peringatan dan informasi lalu lintas daring langsung (real-time)	Dihitung dengan cara jumlah kilometer jalan umum dan jalan berbayar dalam kota yang dicakup oleh peringatan lalu lintas daring langsung dan informasi (pembilang) dibagi dengan jumlah total kilometer jalan umum dan jalan berbayar dalam batas kota (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah yang relevan, atau lembaga yang mengelola dan menyebarluaskan konten daring yang berkaitan dengan lalu lintas wilayah tertentu.
	19.2. Jumlah pengguna transportasi ekonomi berbagi per 100.000 penduduk	Dihitung dengan cara jumlah total pengguna yang secara aktif menggunakan transportasi ekonomi berbagi (pembilang) dibagi dengan 1/100.000 dari total populasi kota (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah terkait atau perusahaan layanan transportasi ekonomi berbagi.
	19.3. Persentase kendaraan yang terdaftar di kota yang merupakan kendaraan rendah emisi	Dihitung dengan jumlah total kendaraan rendah emisi terdaftar dan disetujui yang terdaftar di kota (pembilang) dibagi dengan jumlah total kendaraan terdaftar di kota (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah, atau lembaga yang mengawasi pendaftaran kendaraan.
	19.4. Jumlah sepeda yang tersedia melalui layanan berbagi sepeda yang disediakan oleh kota per 100.000 penduduk	Dihitung dengan jumlah total sepeda yang tersedia melalui layanan berbagi sepeda yang disediakan di kota (pembilang) dibagi dengan 1/100 000 dari total populasi kota (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah terkait yang mengawasi dan / atau mengumpulkan data tentang pembagian sepeda.
	19.5. Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik	Dihitung dengan jumlah jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung yang dapat diakses oleh publik untuk menyediakan informasi operasi (pembilang) langsung kepada orang-orang yang dibagi dengan jumlah total jalur transportasi umum dalam batas kota (penyebut).	Diambil dari organisasi perangkat daerah terkait yang mengawasi transportasi umum dan memantau lalu lintas.
	19.6. Persentase layanan transportasi umum kota yang dicakup oleh sistem pembayaran terpadu	Dihitung dengan jumlah layanan transportasi umum kota yang terhubung oleh sistem pembayaran terpadu (pembilang) dibagi dengan jumlah total layanan transportasi umum kota (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah terkait yang bertanggung jawab atas sistem transit kota.



KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR	PERSYARATAN	SUMBER DATA
	19.7. Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem pembayaran elektronik	Dihitung dengan cara jumlah ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem pembayaran elektronik sebagai metode pembayaran (pembilang) dibagi dengan jumlah total ruang parker umum di kota (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah yang mengawasi parkir umum, serta organisasi apa pun (publik atau swasta) yang mengawasi sistem pembayaran elektronik di kota yang relevan dengan parkir umum.
	19.8. Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem ketersediaan parkir langsung (real-time)	Dihitung dengan jumlah ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem ketersediaan langsung (pembilang) dibagi dengan jumlah total ruang parkir umum di kota (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah yang mengawasi parkir umum.
	19.9. Persentase lampu lalu lintas yang cerdas	Dihitung dengan jumlah lampu lalu lintas di kota yang cerdas (pembilang) dibagi dengan jumlah total lampu lalu lintas di kota (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah terkait yang mengawasi transportasi dan lampu jalan.
	19.10. Area kota dipetakan oleh peta jalan interaktif langsung (real-time) sebagai persentase dari total luas kota	Dihitung dengan total area kota yang dipetakan oleh peta jalan interaktif langsung (pembilang) dibagi dengan total luas lahan kota (penyebut).	Diambil dari organisasi perangkat daerah terkait yang mengawasi jaringan pejalan kaki dan trotoar dan jaringan transportasi umum.
	19.11. Persentase kendaraan yang terdaftar di kota yang merupakan kendaraan otonom (autonomous)	Dihitung dengan jumlah total kendaraan otonom yang terdaftar di kota (pembilang) dibagi dengan jumlah total kendaraan terdaftar di kota (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah atau lembaga yang mengawasi pendaftaran kendaraan.
	19.12. Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau dikelola untuk komuter	Dihitung dengan jumlah kilometer rute angkutan umum di kota dengan konektivitas Internet yang disediakan kota dan / atau dikelola untuk komuter (pembilang) dibagi dengan total jumlah kilometer dari rute angkutan umum di kota (penyebut).	Bersumber dari perusahaan angkutan umum terkait dan / atau departemen transportasi umum kota
	19.13. Persentase jalan yang sesuai dengan sistem mengemudi otonom	Dihitung dengan jumlah kilometer jalan yang sesuai dengan sistem penggerak otonom (pembilang), dibagi dengan jumlah total kilometer jalan (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah terkait.



KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR	PERSYARATAN	SUMBER DATA
	19.14. Persentase armada bus kota yang digerakkan dengan motor	Dihitung dengan jumlah bus di armada bus kota yang digerakkan oleh motor (pembilang) dibagi dengan jumlah total bus dalam armada bus kota (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah terkait yang bertanggung jawab atas sistem transit kota.
20. Pertanian perkotaan / lokal dan ketangguhan pangan	20.1. Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Dihitung dengan jumlah total anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan untuk tahun tertentu (pembilang) dibagi dengan total anggaran kota untuk tahun yang sama (penyebut).	Bersumber dari laporan keuangan yang diaudit dari anggaran kota atau organisasi perangkat daerah terkait yang mengawasi keuangan.
	20.2. Total limbah makanan kota yang dikumpulkan tahunan dikirim ke fasilitas pemrosesan untuk pengomposan per kapita (dalam ton)	Dihitung dengan jumlah total limbah makanan (rumah tangga dan komersial) yang dikumpulkan dalam ton (pembilang) dibagi dengan total populasi kota (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah terkait yang bertanggung jawab atas pengumpulan sampah, daur ulang, sanitasi dan / atau layanan pengomposan.
	20.3. Persentase luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring	Dihitung dengan total luas lahan yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan (pembilang) daring dibagi dengan total luas lahan kota (penyebut).	Bersumber dari departemen / kementerian kota yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat dan program kesehatan dan kebugaran dan / atau pengembangan aplikasi pemetaan GIS.
21. Perencanaan kota	21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Dihitung sebagai jumlah total warga yang berpartisipasi atau terlibat dalam proses perencanaan pada suatu basis tahunan (pembilang) dibagi dengan 1/100 000 dari total populasi kota (penyebut).	Bersumber dari catatan kehadiran proses perencanaan keterlibatan, dengar pendapat, dan acara (baik daring dan tatap muka) sering dicatat dalam laporan perencanaan dan kebijakan sebagai prasyarat untuk persetujuan.
	21.2. Persentase izin bangunan yang diajukan melalui sistem pengiriman elektronik	Dihitung sebagai jumlah izin bangunan yang diajukan melalui sistem pengiriman elektronik (pembilang) dibagi dengan jumlah total izin bangunan yang diajukan melalui elektronik sistem pengiriman dan sistem manual langsung (misal aplikasi melalui kertas).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah terkait yang mengawasi pengajuan izin bangunan.



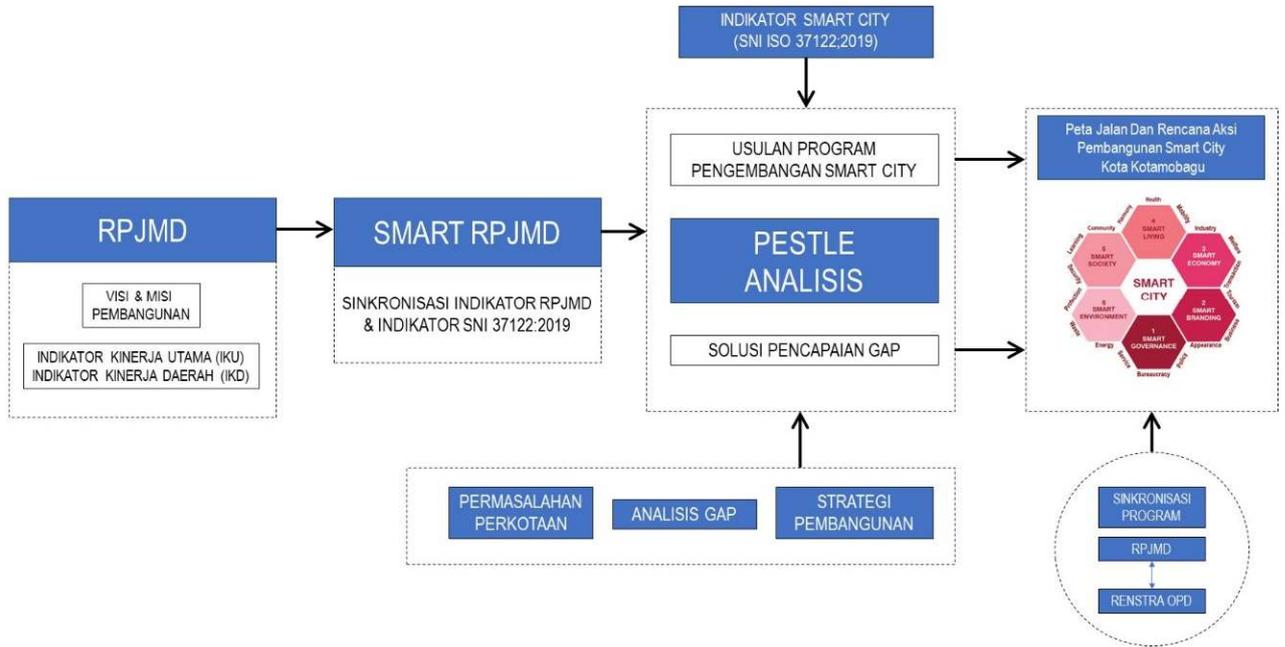
KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR	PERSYARATAN	SUMBER DATA
	21.3. Waktu rata-rata untuk persetujuan izin bangunan (hari)	Dihitung sebagai jumlah hari izin bangunan dari awal hingga selesai (pembilang) dibagi dengan jumlah total izin bangunan (penyebut).	Bersumber dari pemerintahan kota terkait yang mengawasi persetujuan izin bangunan.
	21.4. Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan populasi sedang hingga tinggi	Dihitung sebagai jumlah orang yang tinggal di daerah dengan kepadatan penduduk sedang hingga tinggi (pembilang) dibagi dengan total populasi kota (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah terkait yang mengawasi statistik perencanaan dan kependudukan perkotaan.
22. Air Limbah	22.1. Persentase air limbah olahan yang digunakan kembali	Dihitung sebagai total volume tahunan dari air limbah yang diolah yang digunakan kembali (pembilang) dibagi dengan total volume tahunan yang diolah air limbah (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah, kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan air limbah dan jaringan air limbah.
	22.2. Persentase biosolids yang digunakan kembali (massa bahan kering)	Dihitung sebagai jumlah total biosolids tahunan yang digunakan kembali dalam massa bahan kering (pembilang) dibagi dengan jumlah total biosolids tahunan diproduksi dan diukur di outlet situs di kota dalam massa bahan kering (penyebut).	Bersumber dari organisasi perangkat daerah yang relevan, kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan limbah padat, air limbah, dan sistem pembuangan limbah.
	22.3. Energi yang berasal dari air limbah sebagai persentase dari total konsumsi energi kota	Dihitung sebagai jumlah dari jumlah total energi tahunan yang berasal dari jaringan air limbah dan instalasi pengolahan air limbah (pembilang) dibagi dengan total konsumsi energi kota (penyebut).	Diperoleh dari indikator ISO 37120 Penggunaan energi per kapita dikalikan dengan jumlah populasi kota.
	22.4. Persentase jumlah total air limbah di perkotaan yang digunakan untuk menghasilkan energi	Dihitung sebagai jumlah total air limbah yang digunakan untuk menghasilkan energi (pembilang) dibagi dengan total jumlah air limbah di kota (penyebut).	Bersumber dari utilitas lokal, atau organisasi perangkat daerah terkait itu mengawasi pengolahan air limbah dan pembangkit energi terkait.
	22.5. Persentase jaringan pipa air limbah yang dimonitor oleh system sensor data tracking real-time	Dihitung sebagai panjang jaringan pipa air limbah yang dipantau oleh data langsung sistem sensor pelacakan dalam kilometer (pembilang) dibagi dengan panjang total pipa air	Bersumber dari organisasi perangkat daerah terkait yang bertanggung jawab untuk air limbah, atau organisasi utilitas publik.



KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR	PERSYARATAN	SUMBER DATA
		limbah jaringan dalam kilometer (penyebut).	
23. Air	23.1. Persentase air minum yang dilacak oleh stasiun pemantauan kualitas air langsung (real-time)	Dihitung sebagai jumlah air minum yang telah menjalani pemantauan kualitas air secara langsung stasiun pemantauan kualitas air di kota (pembilang) dibagi dengan jumlah total air minum didistribusikan.	Bersumber dari organisasi perangkat daerah terkait yang mengawasi kualitas air minum perkotaan.
	23.2. Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (real-time) per 100.000 populasi	Dihitung sebagai jumlah total stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung di kota (pembilang) dibagi dengan 1/100 000 dari total populasi kota (penyebut).	Diambil dari organisasi perangkat daerah terkait yang mengawasi kualitas air dari jaringan air alami kota dan lingkungan perkotaan.
	23.3. Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh air cerdas sistem	Dihitung sebagai panjang jaringan distribusi air yang dicakup oleh sistem air cerdas di kilometer (pembilang) dibagi dengan total panjang jaringan distribusi air (penyebut).	Bersumber dari pengelola air kota, kabupaten dan provinsi atau organisasi perangkat daerah atau kementerian/Lembaga terkait yang menyimpan data jaringan sistem air setempat.
	23.4. Persentase bangunan di perkotaan dengan meteran air cerdas	Dihitung sebagai jumlah bangunan di kota dengan meteran air cerdas (pembilang) dilengkapi dengan jumlah total bangunan di kota (penyebut).	Bersumber dari penyedia air lokal atau regional, atau kota terkait departemen atau kementerian yang menyimpan data pada meteran air cerdas setempat.

Sumber: SNI ISO 37122:2019 (Indikator Kota Cerdas)

Kemudian untuk melihat kerangka pikir penyusunan *Masterplan Smart City* Kota Kotamobagu dapat dilihat pada diagram kerangka pikir di bawah. Kerangka pikir tersebut menunjukkan bahwa *Masterplan Smart City* Kota Kotamobagu tidak dapat berdiri sendiri, tetapi *Masterplan Smart City* ini adalah sebuah dokumen perencanaan pembangunan *Smart City* Daerah yang disusun menggunakan indikator dalam aneka macam faktor kesiapan wilayah dan RPJMD Kota Kotamobagu. Berikut merupakan diagram kerangka pikir penyusunan *Masterplan Smart City* Kota Kotamobagu.



**Gambar 1.3** Diagram Kerangka Pikir Penyusunan *Masterplan Smart City* Kota Kotamobagu

*Sumber: Hasil Analisis, 2023*



**2**  
**BAB**

## **ARAH PEMBANGUNAN *SMART CITY* DAERAH**

Bab Arah Pembangunan *Smart City* Daerah berisi tentang visi, misi, serta sasaran dari *Smart City* Kota Kotamobagu yang telah dirumuskan bersama dengan pemerintah daerah Kota Kotamobagu. Visi dan misi tersebut berisikan cita-cita yang diharapkan pemerintah daerah dengan adanya penyusunan *Smart City* di Kota Kotamobagu. Selain itu, bab ini juga menjabarkan indikator Utama *Smart City* ditinjau dari indikator kinerja dalam RPJMD Kota Kotamobagu 2018-2023 serta indikator utama *Smart City* berdasarkan SNI ISO 31722:2019

### **2.1. VISI, MISI, DAN SASARAN *SMART CITY* DAERAH**

Visi, Misi, dan Sasaran merupakan tiga hal utama yang harus pertama dirumuskan dalam membentuk konsep *Smart City*. Perumusan harus disesuaikan dengan teori pedoman *Smart City*. Visi, Misi, dan Sasaran dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di setiap wilayah masing-masing.

#### **2.1.1. VISI PEMBANGUNAN *SMART CITY***

*Masterplan Smart City* Kota Kotamobagu merupakan dokumen perencanaan operasional yang termasuk ke dalam substansi RPJMD Kota Kotamobagu tahun 2018-2023. Terdapat 6 konsep dimensi yang menjadi inti dari *Masterplan Smart City*. Keenam dimensi tersebut diantaranya penataan reformasi birokrasi atau *smart governance*, pemasaran dan *branding* daerah atau *smart branding*, penataan ekosistem permukiman masyarakat atau *smart living*, pengembangan produk perekonomian wilayah atau *smart economy*, pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan atau *smart environment*, serta penyelarasan lingkungan tempat tinggal masyarakat atau *smart society*.

Konsep *Smart City* dirumuskan dan berpedoman pada RPJMD yang mengandung isu strategis wilayah, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas program pembangunan yang akan direalisasikan. Kemudian perencanaan strategis digunakan sebagai bahan untuk merumuskan Visi *Smart City* Kota Kotamobagu dan dijabarkan dalam strategi dan rencana aksi dari 6 dimensi *Smart City*. Dimana di dalam 6 dimensi *Smart City* ini termuat program-program unggulan atau *quick wins* serta penentuan terhadap prioritas pelaksanaan strategi serta rencana aksi yang dirumuskan dalam Peta Jalan atau *road map*. Hasil dari sinkronisasi program dan



strategi sebelumnya berimplikasi terhadap rencana jangka menengah daerah yang tertuang di dalam RPJMD Kota Kotamobagu tahun 2018-2023 sehingga terbentuklah visi Kota Kotamobagu, yaitu:

**“KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN  
BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN  
BERDAYA SAING”**

Visi pembangunan jangka menengah di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

**KOTA JASA**, yakni terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai kota jasa berbasis kesejahteraan masyarakat, berdaya saing dan meningkatkan pelayanan publik.

**PERDAGANGAN**, yakni tercapainya masyarakat Kota Kotamobagu yang mandiri berbasis jasa ekonomi kerakyatan melalui pengembangan pertanian organik, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan peralatan otomotif yang menunjang UMKM, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, kesenian, hiburan dan rekreasi.

**KEBUDAYAAN LOKAL** yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang moderen, religius serta berlandaskan pada kepribadian yang dinamis, kreatif, inovatif dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan global tanpa mengabaikan nilai-nilai dan jati diri serta warisan leluhur masyarakat berdasarkan prinsip “*Moposad dan Pogogutat Motolu Adi*”.

**MASYARAKAT SEJAHTERA** yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki kualitas hidup yang layak, lingkungan hidup yang bermutu, mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**BERDAYA SAING** yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang inklusif dan kompetitif (memiliki teknologi, tenaga ahli, dan toleransi yang tinggi).

Berdasarkan pertimbangan kebijakan perencanaan jangka panjang, mengkaji visi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu tahun 2018-2023, berbagai isu strategis dari tingkat lokal hingga tingkat internasional, serta kesesuaian dengan nilai-nilai pembangunan Kota Kotamobagu, maka dirumuskan Visi *Smart City* Kota Kotamobagu sebagai berikut:



## VISI PEMBANGUNAN *SMART CITY* KOTA KOTAMOBAGU

### **MEWUJUDKAN KOTAMOBAGU SEBAGAI PUSAT JASA DAN PERDAGANGAN YANG INOVATIF, CERDAS, DAN BERBUDAYA, MENYEDIAKAN LAYANAN UNGGUL SERTA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SECARA MERATA**

- **INOVATIF**

Pembangunan pusat jasa dan perdagangan di Kota Kotamobagu diharapkan mampu berkembang maju dan adaptif menyesuaikan kemajuan zaman serta memberikan gagasan-gagasan baru di bidang perdagangan jasa. Selain itu, pusat jasa dan perdagangan di Kota Kotamobagu mampu dioperasikan dengan menggunakan inovasi-inovasi berbasis IT sehingga dapat melayani dengan cepat, tepat, dan dengan mudah merambah ke dunia pasar global.

- **CERDAS**

Terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai pusat jasa dan perdagangan dengan melibatkan semua *stakeholder* sehingga semakin mudah tercapainya tujuan dengan peran dan bidang masing-masing. Keterlibatan *stakeholder* juga memberikan kemudahan akses kepada investor dan pelaku bisnis yang tertarik pada suatu daerah sekaligus mampu memperkenalkan budaya dan nilai-nilai daerah kepada masyarakat luas. Saran dan aspirasi masyarakat harus transparan untuk mempertahankan kepercayaan serta dukungan dalam mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai pusat jasa dan perdagangan yang cerdas dan berbudaya.

- **BERBUDAYA**

Terciptanya pusat perdagangan dan jasa yang berlandaskan pada kepribadian yang dinamis, kreatif, inovatif dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan global tanpa mengabaikan nilai-nilai dan jati diri serta warisan leluhur masyarakat berdasarkan prinsip “*Moposad dan Pogogutat Motolu Adi*”.



- **MENYEDIAKAN LAYANAN UNGGUL**

Kota Kotamobagu selalu menyediakan layanan yang inklusif dan kompetitif (memiliki teknologi, tenaga ahli, dan toleransi yang tinggi) bagi seluruh masyarakat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya yaitu dengan meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- **BERKELANJUTAN**

Pembangunan ekonomi Kota Kotamobagu menggunakan model pertumbuhan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup dan keadilan sosial. Pembangunan ekonomi berkelanjutan dimaksudkan untuk membangun ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama pembangunan berkelanjutan yaitu mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat di masa sekarang dan masa depan secara berkelanjutan.

- **KESEJAHTERAAN RAKYAT SECARA MERATA**

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas di Kota Kotamobagu yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat setempat, serta mendongkrak tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja. Kesejahteraan rakyat secara merata diharapkan mampu menjadikan perekonomian Kota Kotamobagu yang semakin berkurang jumlah penduduk miskinnya, semakin berkurang jumlah penduduk usia produktif yang masih menganggur, serta semakin mengecilnya kesenjangan ekonomi antar sesama penduduk Kota Kotamobagu.

### 2.1.2. MISI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

Visi pembangunan *smart city* akan dijabarkan ke dalam misi pembangunan untuk lebih dapat dioperasionalkan. Terdapat 6 misi pengembangan *Smart City* Kota Kotamobagu sesuai dengan dimensi *Smart City* yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*.



**MISI PENGEMBANGAN *SMART CITY*  
KOTA KOTAMOBAGU**

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, bantuan hukum dan layanan eksaminasi hukum yang berkualitas, pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi
2. Meningkatkan daya saing Pariwisata (Tourism Branding)
3. Meningkatkan daya saing industri melalui inovasi dan pengembangan teknologi serta mendorong penguatan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja melalui program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri
4. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
5. Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai kota yang cerdas, inovatif dan aman berdasarkan kearifan lokal
6. Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreativitas yang berbasis potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan serta mewujudkan penanggulangan bencana dengan mengedepankan prinsip pengurangan resiko bencana dan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana.

**2.1.3. SASARAN PEMBANGUNAN *SMART CITY* KOTA KOTAMOBAGU**

Berdasarkan visi dan misi yang telah dijabarkan pada sub bab di atas, kemudian ditentukan sasaran pada setiap misi yang akan dilaksanakan. Sasaran digunakan sebagai arah dalam melaksanakan semua urusan pemerintahan di suatu daerah, baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Uraian sasaran pada setiap misinya diuraikan secara lengkap pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Pengembangan *Smart City* Kota Kotamobagu**

Misi	Sub-Dimensi	Sasaran
Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, bantuan hukum dan layanan eksaminasi hukum yang berkualitas, pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi	G.1. Pelayanan Publik	G.1.1. Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan
		G.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
		G.1.3. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah
		G.1.4. Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat.
		G.1.5. Meningkatnya nilai investasi daerah



Misi	Sub-Dimensi	Sasaran
	G.2. Birokrasi yang efisien	G.2.1. Meningkatnya Kualitas ASN
		G.2.2. Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan
		G.2.3. Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah
		G.2.4. Meningkatnya dukungan kinerja sekretariat DPRD
		G.2.5. Mempermudah pelayanan pemerintahan serta mendukung pencapaian reformasi birokrasi
		G.2.6. Meningkatnya dukungan teknis administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden
	G.3. Kebijakan Publik	G.3.1. Meningkatnya Kepastian Hukum dan Penataan Produk Hukum Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Perundangundangan
		G.3.2. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah
Meningkatkan daya saing Pariwisata (Tourism Branding)	B.1. Pariwisata	B.1.1. Meningkatnya PDRB Kotamobagu
	B.2. Kemudahan Pelaksanaan Bisnis	B.2.1. Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata Daerah
	B.3. Wajah Kota	B.3.1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
		B.3.2. Memperluas akses lapangan kerja
		B.3.3. Berkurangnya Pengangguran
		B.3.4. Meningkatnya Citra Daerah
Meningkatkan daya saing industri melalui inovasi dan pengembangan teknologi serta mendorong penguatan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja melalui program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri	Ec.1. Industri Berdaya Saing	Ec.1.1. Meningkatnya peran industri Kecil Menengah dalam perekonomian nasional dan Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri
	Ec.2. Kesejahteraan Masyarakat	Ec.2.1. Menurunkan angka kemiskinan
	Ec.3. Transaksi Keuangan	Ec.3.1. Peningkatan transaksi keuangan secara <i>cashless</i>
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Lv.1. Harmonisasi Tata Ruang	Lv.1.1. Harmonisasi tata ruang wilayah
	Lv.2. Sarana/Prasarana Kesehatan	Lv.2.1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan
	Lv.3. Sarana/Prasarana Transportasi	Lv.3.1. Meningkatkan sarana, prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai kota yang cerdas, inovatif	S.1. Interaksi Masyarakat yang Efisien	S.1.1. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa
	S.2. Ekosistem Belajar	S.2.1. Meningkatnya budaya baca pada tingkat pendidikan



Misi	Sub-Dimensi	Sasaran
dan aman berdasarkan kearifan lokal		S.2.2. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Kompetitif dan Kreatif
	S.3. Sistem Keamanan dan keselamatan Masyarakat	S.3.1. Meningkatnya pencapaian Indikator KLA
		S.3.2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan
		S.3.3. Meningkatnya penegakan hukum terhadap korban kekerasan
		S.3.4. Meningkatnya Ketangguhan terhadap bencana
		S.3.5. Meningkatnya Pemulihan Pasca Bencana pada Kawasan yang terdampak bencana
Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreativitas yang berbasis potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan serta mewujudkan penanggulangan bencana dengan mengedepankan prinsip pengurangan resiko bencana dan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana.	En.1. Perlindungan Lingkungan Hidup	En.1.1. Menguatkan pengawasan dan penindakan pencemaran lingkungan oleh dunia usaha dan masyarakat secara kolaboratif
	En.2. Pengelolaan Sampah dan Limbah	En.2.1. Meningkatnya pengelolaan sampah perkotaan
	En.3. Tata kelola Energi	En.3.1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi secara partisipatif didukung pengembangan energi alternatif

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

## 2.2. INDIKATOR UTAMA SMART CITY DAERAH

Indikator utama *Smart City* dirumuskan berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD bahkan dari indikator program maupun kegiatan dalam dokumen perencanaan milik pemerintah daerah, dan juga Indikator *Smart City* yang ada pada SNI ISO 37122:2019. Indikator *Smart City* dijabarkan berdasarkan enam dimensi yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya. Berikut merupakan uraian lengkap indikator utama *Smart City* daerah.



### 2.2.1 INDIKATOR *SMART GOVERNANCE*

Indikator *Smart Governance* diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran *Smart Governance*. Dimana sasaran *Smart Governance* akan digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja. Berikut merupakan uraian indikator *Smart Governance* yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 1**  
**Indikator *Smart Governance***

DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
		TAHAP I RPJMD (2018-2023)	TAHAP II SNI ISO 37122:2019
<i>SMART GOVERNANCE</i>	G.1.1. Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase pelayanan penerbitan perizinan	21.3. Waktu rata-rata untuk persetujuan izin bangunan (hari)
	G.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) (Opini)	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri
	G.1.3. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Persentase Peningkatan SDM Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	13.4. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital
	G.1.4. Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat.	Persentase Peningkatan kualitas PSKS	5.4. Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan
	G.1.5. Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase Peningkatan Potensi Investasi Daerah	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk
	G.2.1. Meningkatnya Kualitas ASN	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)
	G.2.2. Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) (Opini)	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri



DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
		TAHAP I RPJMD (2018-2023)	TAHAP II SNI ISO 37122:2019
	G.2.3. Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Persentase Peningkatan Kualitas OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik
	G.2.4. Meningkatnya dukungan kinerja sekretariat DPRD	Persentase Agenda Kegiatan DPRD yang terfasilitasi	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)
	G.2.5. Mempermudah pelayanan pemerintahan serta mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Cakupan pengembangan Data dan Informasi dalam peningkatan penyelenggaraan E-Government	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring
	G.2.6. Meningkatnya dukungan teknis administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	Predikat Nilai Sakip	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)
	G.3.1. Meningkatnya Kepastian Hukum dan Penataan Produk Hukum Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Perundangundangan	Persentase Penataan Produk Hukum Daerah	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital
	G.3.2. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Investasi Daerah	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk

Sumber: Analisis Penyusun, 2023

## 2.2.2 INDIKATOR SMART BRANDING

Indikator *Smart Branding* diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran *Smart Branding*. Dimana sasaran *Smart Branding* menjadi hal utama dalam penyusunan *Masterplan Smartcity*. Hal ini karena di zaman modern diperlukan penataan kota yang menarik dan harus memiliki ciri khas supaya menarik partisipasi pelaku bisnis, investor, pengunjung, maupun penduduk daerah lain. Sehingga mampu meningkatkan nilai *branding* daerah tersebut. Berikut merupakan uraian indikator *Smart Branding* yang disajikan dalam tabel di bawah ini.



**Tabel 2. 2**  
**Indikator *Smart Branding***

DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA <i>SMART CITY</i>	
		TAHAP I RPJMD (2018-2023)	TAHAP II SNI ISO 37122:2019
<i>SMART BRANDING</i>	B.1.1. Meningkatnya PDRB Kotamobagu	PDRB per kapita	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri
	B.2.1. Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata Daerah	Persentase Peningkatan PAD	
	B.3.1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Peningkatan SDM Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	13.4. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital
	B.3.2. Memperluas akses lapangan kerja	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	5.4. Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan
	B.3.3. Berkurangnya Pengangguran	Rasio daya serap tenaga kerja	
	B.3.4. Meningkatnya Citra Daerah	Persentase Peningkatan Destinasi Pariwisata	14.1. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring

Sumber: Analisis Penyusun, 2023

### 2.2.3 INDIKATOR *SMART ECONOMY*

Indikator *Smart Economy* diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran *Smart Economy*. Dimana sasaran *Smart Economy* digunakan untuk menghadapi tantangan dan adaptif terhadap perubahan sehingga terwujudnya ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah. Berikut merupakan uraian indikator *Smart Economy* yang disajikan dalam tabel di bawah ini.



**Tabel 2. 3**  
**Indikator *Smart Economy***

DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA <i>SMART CITY</i>	
		TAHAP I RPJMD (2018-2023)	TAHAP II SNI ISO 37122:2019
<i>SMART ECONOMY</i>	Ec.1.1. Meningkatnya peran industri Kecil Menengah dalam perekonomian nasional dan Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk
	Ec.2.1. Menurunkan angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	5.4. Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan
	Ec.3.1. Peningkatan transaksi keuangan secara <i>cashless</i>		9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik

Sumber: Analisis Penyusun, 2023

#### 2.2.4 INDIKATOR *SMART LIVING*

Indikator *Smart Living* diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran *Smart Living*. Dimana sasaran *Smart Living* adalah untuk mewujudkan pengelolaan kualitas hidup dan budaya yang lebih baik dan pintar. Sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut merasa aman dan nyaman dengan adanya *Smart City*. Berikut merupakan uraian indikator *Smart Living* yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 4**  
**Indikator *Smart Living***

DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA <i>SMART CITY</i>	
		TAHAP I RPJMD (2018-2023)	TAHAP II SNI ISO 37122:2019
<i>SMART LIVING</i>	Lv.1.1. Harmonisasi tata ruang wilayah	Persentase Kesesuaian Ruang	21.4. Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan populasi sedang hingga tinggi



DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
		TAHAP I RPJMD (2018-2023)	TAHAP II SNI ISO 37122:2019
	Lv.2.1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)
	Lv.3.1. Meningkatkan sarana, prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Peningkatan prasarana dan fasilitas bidang perhubungan	19.1. Persentase jalan umum dan jalan berbayar yang dicakup oleh peringatan dan informasi lalu lintas daring langsung (real-time)

Sumber: Analisis Penyusun, 2023

### 2.2.5 INDIKATOR SMART SOCIETY

Indikator *Smart Society* diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran *Smart Society*. Dimana sasaran *Smart Society* digunakan sebagai langkah untuk mencapai ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi. Berikut merupakan uraian indikator *Smart Society* yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 5**  
**Indikator *Smart Society***

DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
		TAHAP I RPJMD (2018-2023)	TAHAP II SNI ISO 37122:2019
<b>SMART SOCIETY</b>	S.1.1. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase pemilihan sangadi	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring
	S.2.1. Meningkatnya budaya baca pada tingkat pendidikan	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	17.3. Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk



DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA <i>SMART CITY</i>	
		TAHAP I RPJMD (2018-2023)	TAHAP II SNI ISO 37122:2019
	S.2.2. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Kompetitif dan Kreatif	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan Per tahun	17.4. Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif
	S.3.1. Meningkatnya pencapaian Indikator KLA	Cakupan Lembaga Pemenuhan Indikator KLA	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring
	S.3.2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital
	S.3.3. Meningkatnya penegakan hukum terhadap korban kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital
	S.3.4. Meningkatnya Ketangguhan terhadap bencana	Persentase Keselamatan masyarakat di kawasan rawan bencana	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital
	S.3.5. Meningkatnya Pemulihan Pasca Bencana pada Kawasan yang terdampak bencana	Persentase Sarana dan Prasarana daerah rawan bencana yang direhabilitasi	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital

Sumber: Analisis Penyusun, 2023

### 2.2.6 INDIKATOR *SMART ENVIRONMENT*

Indikator *Smart Environment* diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran *Smart Environment*. Dimana sasaran *Smart Environment* digunakan sebagai langkah untuk menciptakan lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, lingkungan yang bersih tertata, dan ruang terbuka hijau (RTH) yang representatif. Berikut merupakan uraian indikator *Smart Society* yang disajikan dalam tabel di bawah ini.



**Tabel 2. 6**  
**Indikator *Smart Environment***

DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA <i>SMART CITY</i>	
		TAHAP I RPJMD (2018-2023)	TAHAP II SNI ISO 37122:2019
<b><i>SMART ENVIRONMENT</i></b>	En.1.1. Memperkuat pengawasan dan penindakan pencemaran lingkungan oleh dunia usaha dan masyarakat secara kolaboratif	Persentase Lokasi Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	8.3. Persentase bangunan umum yang dilengkapi untuk memantau kualitas udara dalam ruangan
	En.2.1. Meningkatnya pengelolaan sampah perkotaan	Persentase Jumlah Sampah yang Berkurang Melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	16.4. Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota
	En.3.1 Meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi secara partisipatif didukung pengembangan energi alternatif	Cakupan Konsumsi Energi	16.3. Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilkan energi

Sumber: Analisis Penyusun, 2023



**3**  
**BAB**

**STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY KOTA KOTAMOBAGU**

Bab Strategi Pembangunan *Smart City* Kota Kotamobagu berisi tentang strategi pengembangan *Smart City* ditintang dari 6 (enam) dimensi *Smart City* yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*. Dalam merumuskan strategi *Smart City* Kota Kotamobagu didasarkan pada tujuan untuk setiap dimensi dan subdimensi.

**3.1. STRATEGI PEMBANGUNAN SMART GOVERNANCE**

Strategi pembangunan *Smart Governance* terbagi menjadi tiga sub-dimensi yaitu pelayanan publik, birokrasi yang efisien, serta kebijakan publik. Strategi pembangunan *Smart Governance* menitikberatkan pada sub-dimensi birokrasi yang efisien dengan sasaran meningkatkan kualitas ASN agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih prima dan optimal. Sedangkan, strategi peningkatan pelayanan publik dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dari segi kebijakan publik strategi pembangunan *Smart Governance* Kota Kotamobagu adalah dengan peningkatan kepastian hukum dan peraturan terkait peningkatan nilai investasi daerah untuk kemajuan Kota Kotamobagu.

**Tabel 3. 1**

**Sasaran dan Strategi Pembangunan *Smart Governance***

KOMPONEN SMART CITY	SUB-DIMENSI	SASARAN	STRATEGI
SMART GOVERNANCE	G.1. Pelayanan Publik	G.1.1. Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	G.1.1.1. Promosi Investasi Daerah
			G.1.1.2. Bimbingan Teknis kepada pelaku Usaha terkait OSS dan LKPM
			G.1.1.3. Memudahkan Investasi PMA/PMDN untuk Berinvestasi sesuai dengan potensi dan kesesuaian Ruang.
		G.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	G.1.2.1. Menerapkan pembinaan penatausahaan keuangan bagi PD dan aparat Desa melalui Sosialisasi/Bimbingan Teknis;
		G.1.3. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	G.1.3.1.. Menciptakan perilaku masyarakat yang tangguh dan amanah
		G.1.4. Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat.	G.1.4.1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan
			G.1.4.2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sarana dan prasarana Kelurahan.



KOMPONEN SMART CITY	SUB-DIMENSI	SASARAN	STRATEGI	
		G.1.5. Meningkatnya nilai investasi daerah	G.1.5.1. Promosi Investasi Daerah	
	G.2. Birokrasi yang Efisien	G.2.1. Meningkatnya Kualitas ASN	G.2.1.1. Peningkatan Standar Kompetensi Sumber Daya Aparatur	G.2.1.1. Peningkatan Standar Kompetensi Sumber Daya Aparatur
			G.2.1.2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi aparatur sesuai dengan potensi dan kompetensi	G.2.1.2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi aparatur sesuai dengan potensi dan kompetensi
			G.2.1.3. Penerapan pelayanan kepegawaian yang transparan, cepat dan tepat	G.2.1.3. Penerapan pelayanan kepegawaian yang transparan, cepat dan tepat
			G.2.1.4. Terdapat Lembaga Bantuan Hukum KORPRI untuk pendampingan litigasi maupun non litigasi bagi Anggota KORPRI	G.2.1.4. Terdapat Lembaga Bantuan Hukum KORPRI untuk pendampingan litigasi maupun non litigasi bagi Anggota KORPRI
		G.2.2. Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan	G.2.2.1. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi;	G.2.2.1. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi;
		G.2.3. Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	G.2.3.1. Melaksanakan Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan PD berbasis akrual secara berkala	G.2.3.1. Melaksanakan Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan PD berbasis akrual secara berkala
			G.2.3.2. Melaksanakan inventarisasi Aset Daerah	G.2.3.2. Melaksanakan inventarisasi Aset Daerah
			G.2.3.3. Melakukan sertifikasi penilai BMD	G.2.3.3. Melakukan sertifikasi penilai BMD
			G.2.3.4. Pelaksanaan pendataan massal objek pajak	G.2.3.4. Pelaksanaan pendataan massal objek pajak
			G.2.3.5. Pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	G.2.3.5. Pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT
	G.2.4. Meningkatnya dukungan kinerja sekretariat DPRD	G.2.4.1. Memberikan daya dukung internal yang cukup untuk menyiapkan fasilitasi terhadap agenda DPRD	G.2.4.1. Memberikan daya dukung internal yang cukup untuk menyiapkan fasilitasi terhadap agenda DPRD	
	G.2.5. Mempermudah pelayanan pemerintahan serta mendukung pencapaian reformasi birokrasi	G.2.5.1. Pelaksanaan <i>E-government</i>	G.2.5.1. Pelaksanaan <i>E-government</i>	
		G.2.5.2. Pengembangan Basis Data Pembangunan Daerah	G.2.5.2. Pengembangan Basis Data Pembangunan Daerah	
G.2.6. Meningkatnya dukungan teknis administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	G.2.6.1. Meningkatkan predikat nilai Sakip Kota Kotamobagu	G.2.6.1. Meningkatkan predikat nilai Sakip Kota Kotamobagu		
G.3. Kebijakan Publik	G.3.1. Meningkatnya Kepastian Hukum dan Penataan Produk Hukum Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Perundangundangan	G.3.1.1. Meningkatkan mutu pelayanan hukum sesuai sistem tata kelola pemerintah yang baik	G.3.1.1. Meningkatkan mutu pelayanan hukum sesuai sistem tata kelola pemerintah yang baik	
	G.3.2. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	G.3.2.1. Penyusunan peraturan pendukung terkait pelayanan perizinan dan penanaman modal	G.3.2.1. Penyusunan peraturan pendukung terkait pelayanan perizinan dan penanaman modal	

Sumber: Hasil Assesment Daerah Kota Kotamobagu, 2023

Berdasarkan tabel sasaran dan strategi pembangunan *smart governance* di atas diketahui bahwa setiap sasaran dari masing-masing sub dimensi memiliki beberapa strategi. Dimana strategi tersebut digunakan untuk mencapai misi yang pertama *smart city* Kota Kotamobagu yaitu meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, bantuan hukum dan layanan eksaminasi hukum yang berkualitas, pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi.



### 3.2. STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART BRANDING*

Strategi pembangunan *Smart Branding* di Kota Kotamobagu dengan cara peningkatan kualitas wisata dan pemberdayaan budaya lokal daerah Bolaang Mongondow. Melakukan promosi dan *mix marketing* dengan menggunakan teknologi informasi sehingga calon wisatawan dapat mengetahui berbagai informasi kepariwisataan di Kota Kotamobagu. Dari segi sub dimensi wajah kota strategi pembangunan yang dilakukan yaitu dengan peningkatan infrastruktur pariwisata sehingga kemudahan aksesibilitas bagi wisatawan. Selain dengan peningkatan infrastruktur, strategi lain juga dilakukan yaitu berupa peningkatan mutu keterampilan SDM kepariwisataan dalam menunjang pelayanan di bidang kepariwisataan.

**Tabel 3. 2**

**Sasaran dan Strategi Pembangunan *Smart Branding***

KOMPONEN SMART CITY	SUB-DIMENSI	SASARAN	STRATEGI
SMART BRANDING	B.1. Pariwisata	B.1.1. Meningkatnya PDRB Kotamobagu	B.1.1.1. Promosi dan <i>Mix Marketing</i> pariwisata daerah berbasis Teknologi Informasi ( <i>By Phone</i> )
	B.2. Kemudahan Pelaksanaan Bisnis	B.2.1. Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata Daerah	B.2.1.1. Pemberdayaan Budaya lokal Daerah Bolaang Mongondow
		B.3.1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	B.3.1.1. Peningkatan Kualitas Produk Lokal
	B.3. Wajah Kota	B.3.2. Memperluas akses lapangan kerja	B.3.2.1 Pengelolaan pariwisata dengan Pendekatan <i>Partnership</i>
		B.3.3. Berkurangnya Pengangguran	B.3.3.1. Membangun jaringan Infrastruktur Pariwisata yang memudahkan wisatawan
		B.3.4. Meningkatnya Citra Daerah	B.3.4.1. Peningkatan keterampilan (mutu SDM) yang menunjang Kualitas pelayan Pariwisata

Sumber: Hasil Assesment Daerah Kota Kotamobagu, 2023

Tabel di atas merupakan tabel yang menjabarkan sasaran dan strategi pembangunan *smart branding*. Setiap sasaran dari masing-masing sub dimensi hanya memiliki satu strategi. Strategi-strategi tersebut digunakan untuk mewujudkan misi kedua dari *smart city* Kota Kotamobagu. Misi tersebut adalah meningkatkan daya saing Pariwisata (*Tourism Branding*).



### 3.3. STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART ECONOMY*

Strategi pembangunan *Smart Economy* di Kota Kotamobagu terbagi menjadi industri berdaya saing, kesejahteraan masyarakat, dan transaksi keuangan. Sub dimensi industri berdaya saing memiliki strategi berupa inovasi berbasis penelitian dan pendekatan berbasis ekosistem dan peningkatan SDM serta kualitas pemasaran dan pengelolaan produk dengan membangun sentra-sentra industri dengan memaksimalkan penggunaan teknologi. Dari sub dimensi kesejahteraan memiliki strategi berupa percepatan pengurangan jumlah penduduk miskin. Terakhir, dari segi transaksi keuangan strategi yang disusun yaitu penerapan penggunaan dompet digital (*fintech*).

**Tabel 3. 3**

**Sasaran dan Strategi Pembangunan *Smart Economy***

KOMPONEN <i>SMART CITY</i>	SUB-DIMENSI	SASARAN	STRATEGI
<i>SMART ECONOMY</i>	Ec.1. Industri Berdaya Saing	Ec.1.1. Meningkatnya peran industri Kecil Menengah dalam perekonomian nasional dan Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri	Ec.1.1.1. Inovasi berbasis penelitian, Pendekatan berbasis ekosistem, pengembangan SDM terpadu, Meningkatkan kualitas pemasaran dan pengelolaan produk dengan membangun sentra-sentra industri. serta memaksimalkan penggunaan teknologi digital
	Ec.2. Kesejahteraan Masyarakat	Ec.2.1. Menurunkan angka kemiskinan	Ec.2.1.1. Percepatan pengurangan jumlah penduduk miskin
	Ec.3. Transaksi Keuangan	Ec.3.1. Peningkatan transaksi keuangan secara <i>cashless</i>	Ec.3.1.1. Penerapan penggunaan dompet digital / <i>fintech</i>

Sumber: Hasil Assesment Daerah Kota Kotamobagu, 2023

Tabel di atas menjabarkan tentang sasaran dan strategi pembangunan *smart economy*. Setiap sasaran dari masing-masing sub dimensi memiliki satu strategi. Masing-masing strategi tersebut berisi tentang strategi untuk mewujudkan misi *smart city* Kota Kotamobagu. Misi tersebut berbunyi meningkatkan daya saing industri melalui inovasi dan pengembangan teknologi serta mendorong penguatan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja melalui program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri. Hal ini sudah sesuai dengan strategi-strategi yang diuraikan di atas.



### 3.4. STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART LIVING*

Strategi pembangunan *Smart Living* terdiri dari 3 (tiga) sub dimensi yaitu harmonisasi tata ruang, sarana/prasarana kesehatan, serta sarana/prasarana transportasi. Strategi dari harmonisasi tata ruang yaitu terdiri dari mewujudkan harmonisasi lingkungan dan infrastruktur yang handal serta peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak. Sub dimensi sarana/prasarana kesehatan yaitu pemenuhan akses dan informasi kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Terakhir yaitu sarana/prasarana transportasi memiliki strategi berupa pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan.

**Tabel 3. 4**

**Sasaran dan Strategi Pembangunan *Smart Living***

KOMPONEN <i>SMART CITY</i>	SUB-DIMENSI	SASARAN	STRATEGI
<i>SMART LIVING</i>	Lv.1. Harmonisasi Tata Ruang	Lv.1.1. Harmonisasi tata ruang wilayah	Lv.1.1.1. Mewujudkan harmonisasi lingkungan dan infrastruktur yang handal Lv.1.1.2. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak
	Lv.2. Sarana/Prasarana Kesehatan	Lv.2.1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan	Lv.2.1.1. Pemenuhan akses dan informasi kesehatan
	Lv.3. Sarana/Prasarana Transportasi	Lv.3.1. Meningkatkan sarana, prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Lv.3.1.1. Pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan

Sumber: Hasil Assesment Daerah Kota Kotamobagu, 2023

Sasaran dan strategi pembangunan *smart living* di atas digunakan untuk mewujudkan misi *smart city* Kota Kotamobagu. Misi tersebut ialah meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Kotamobagu. Hal ini sudah sesuai dengan uraian strategi di setiap sasaran yang mengarah pada strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat.



### 3.5. STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART SOCIETY*

Strategi pembangunan *Smart Society* di Kota Kotamobagu yaitu terdiri dari tiga (tiga) sub dimensi yaitu terkait interaksi masyarakat yang efisien, ekosistem belajar, dan sistem keamanan serta keselamatan masyarakat. Interaksi Masyarakat yang efisien yaitu lebih ke peningkatan kemandirian masyarakat desa dengan strategi melakukan pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat desa agar lebih terampil dan unggul. Ekosistem belajar terbagi menjadi strategi untuk peningkatan minat baca dan budaya baca dengan pengadaan mobil perpustakaan keliling dan buku-buku baik cetak maupun digital. Selanjutnya, sistem keamanan dan keselamatan masyarakat memiliki strategi berupa pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, peningkatan SDM, lembaga serta kuantitas sarana prasarana untuk pencegahan kasus kekerasan pada perempuan, peningkatan pelayanan korban kekerasan. Selain itu sosialisasi terkait pengurangan risiko bencana dan pemenuhan sarana prasarana terkait mitigasi bencana yang memadai di kawasan rawan bencana.

**Tabel 3. 5**

**Sasaran dan Strategi Pembangunan *Smart Society***

KOMPONEN <i>SMART CITY</i>	SUB-DIMENSI	SASARAN	STRATEGI
<i>SMART SOCIETY</i>	S.1. Interaksi Masyarakat yang Efisien	S.1.1. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	S.1.1.1. Menyelenggarakan Pelatihan dan Pembinaan
	S.2. Ekosistem Belajar	S.2.1. Meningkatnya budaya baca pada tingkat pendidikan	S.2.1.1. Pengadaan buku-buku bacaan baru
		S.2.2. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Kompetitif dan Kreatif	S.2.2.1. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan
	S.3. Sistem Keamanan dan keselamatan Masyarakat	S.3.1. Meningkatnya pencapaian Indikator KLA	S.3.1.1. Meningkatkan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak
		S.3.2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan	S.3.2.1. Meningkatkan kualitas SDM, lembaga dan kuantitas sarana prasarana untuk pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan.
		S.3.3. Meningkatnya penegakan hukum terhadap korban kekerasan	S.3.3.1. Meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal kepada korban kekerasan
		S.3.4. Meningkatnya Ketangguhan terhadap bencana	S.3.4.1. Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana
		S.3.5. Meningkatnya Pemulihan Pasca Bencana pada Kawasan yang terdampak bencana	S.3.5.1. Pemenuhan SDM yang berkualitas S.3.5.2. Sarana Prasarana yang memadai

Sumber: Hasil Assesment Daerah Kota Kotamobagu, 2023

Berdasarkan tabel sasaran dan strategi pembangunan *smart society* di atas diketahui bahwa setiap sasaran dari masing-masing sub dimensi memiliki beberapa strategi. Dimana strategi



tersebut digunakan untuk mencapai misi *smart city* Kota Kotamobagu yaitu Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai kota yang cerdas, inovatif dan aman berdasarkan kearifan lokal.

### 3.6. STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART ENVIRONMENT*

Strategi pembangunan *Smart Environment* Kota Kotamobagu dibagi menjadi 3 (tiga) sub dimensi yaitu terkait perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah, serta tata kelola energi. Strategi dari perlindungan lingkungan hidup yaitu dengan penguatan pengawasan dan penindakan pencemaran lingkungan secara kolaboratif. Untuk strategi pengelolaan sampah dan limbah yaitu dengan optimalisasi pengelolaan daur ulang sampah dan pemanfaatan *zero waste*. Terakhir, strategi tata kelola energi yaitu dengan pengembangan energi alternatif dan terbarukan.

**Tabel 3. 6**  
**Sasaran dan Strategi Pembangunan *Smart Environment***

KOMPONEN <i>SMART CITY</i>	SUB-DIMENSI	SASARAN	STRATEGI
<i>SMART ENVIRONMENT</i>	En.1. Perlindungan Lingkungan Hidup	En.1.1. Menguatkan pengawasan dan penindakan pencemaran lingkungan oleh dunia usaha dan masyarakat secara kolaboratif	En.1.1.1. Penguatan pengawasan dan penindakan pencemaran lingkungan secara kolaboratif
	En.2. Pengelolaan Sampah dan Limbah	En.2.1. Meningkatnya pengelolaan sampah perkotaan	En.2.1.1. Optimalisasi pengelolaan daur ulang sampah dan pemanfaatan zero waste
	En.3. Tata kelola Energi	En.3.1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi secara partisipatif didukung pengembangan energi alternatif	En.3.1.1. Pengembangan energi alternatif

Sumber: Hasil Assesment Daerah Kota Kotamobagu, 2023

Tabel di atas menjabarkan tentang sasaran dan strategi pembangunan *smart environment*. Masing-masing strategi di atas berisi tentang strategi untuk mewujudkan misi *smart city* Kota Kotamobagu. Misi tersebut berbunyi meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreativitas yang berbasis potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan serta mewujudkan penanggulangan bencana dengan mengedepankan prinsip pengurangan resiko bencana dan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. Hal ini sudah sesuai dengan strategi-strategi yang dijabarkan di atas.



**4**  
**BAB**

## **RENCANA AKSI *SMART CITY* KOTA KOTAMOBAGU**

Bab Rencana Aksi *Smart City* Kota Kotamobagu berisi tentang upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendukung program-program yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Program *Smart City* akan didukung oleh 4 (empat) bentuk rencana aksi yaitu kelembagaan dan kebijakan, infrastruktur, aplikasi atau *software*, serta literasi. Untuk mewujudkan *smart city* Kota Kotamobagu menyusun beberapa rencana aksi yang dikelompokkan dalam 6 (enam) dimensi *smart city*. Proses penyusunan dan integrasi program yang dilakukan merupakan hasil dari *participatory planning*.

Dalam proses menciptakan sebuah kawasan perkotaan yang harmonis dari segala aspek, diperlukan komitmen kolektif. Hal ini juga didukung oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun ruang kota yang saling berkesinambungan dan bermanfaat yang mendukung aktivitas orang-orang yang tinggal di dalamnya. Pemerintah telah menerapkan berbagai konsep perkotaan, salah satunya adalah membangun *smart city* yang dinamis untuk menciptakan ruang dan pembangunan yang inovatif yang didasarkan pada lingkungan di mana orang tinggal. Mereka juga diharapkan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap investasi dan pembangunan di masa depan.



**4.1. RENCANA AKSI SMART GOVERNANCE**

Terdapat 3 komponen utama dalam unsur *smart governance* yakni pelayanan publik (*public service*), manajemen birokrasi yang efisien (*bureaucracy*), serta efisiensi kebijakan publik (*public policy*). Dalam rencana aksi *smart governance*, pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahap disesuaikan dengan program yang akan dilaksanakan. Adapun rencana aksi *smart governance* Kota Kotamobagu sebagai berikut.

**Tabel 4. 1**

**Rencana Aksi Smart Governance Kota Kotamobagu**

SUB-DIMENSI	STRATEGI	INOVASI KEGIATAN/PROGRAM	RENCANA AKSI/TAHUN							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
G.1. Pelayanan Publik	G.1.1.1. Promosi Investasi Daerah	G.1.1.1.1. Program Promosi Penanaman Modal	Pengurusan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Online Single Submission (OSS)	2024 - 2034	Jaringan Internet	2024 - 2034	Laptop	2024 - 2034	Sosialisasi kepada Pelaku Usaha	2024 - 2034
	G.1.1.2. Bimbingan Teknis kepada pelaku Usaha terkait OSS dan LKPM	G.1.1.2.1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Sosialisasi tentang pengurusan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Online Single Submission (OSS)	2024 - 2034	Jaringan Internet	2024 - 2034	Laptop	2024 - 2034	Sosialisasi kepada Pelaku Usaha	2024 - 2034
	G.1.1.3. Memudahkan Investasi PMA/PMDN untuk Berinvestasi sesuai dengan potensi dan kesesuaian Ruang.	G.1.1.3.1. Program promosi tentang berinvestasi sesuai potensi dan kesesuaian ruang	Koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin penanaman modal dan kemudahan berinvestasi	2024 - 2034	Jaringan Internet	2024 - 2034	Laptop	2024 - 2034	Sosialisasi	2024 - 2034



SUB-DIMENSI	STRATEGI	INOVASI KEGIATAN/PROGRAM	RENCANA AKSI/TAHUN							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	G.1.2.1. Menerapkan pembinaan penatausahaan keuangan bagi PD dan aparat Desa melalui Sosialisasi/Bimbingan Teknis;	G.1.2.1.1. Program pembinaan penatausahaan keuangan bagi PD dan aparat Desa	Sosialisasi dan bimbingan teknis penatausahaan keuangan bagi PD dan aparat Desa	2024 - 2034	Jaringan Internet	2024 - 2034	Laptop	2024 - 2034	Sosialisasi kepada Pelaku Usaha	2024 - 2034
	G.1.3.1. Menciptakan perilaku masyarakat yang tangguh dan amanah	G.1.3.1.1. Program Pencatatan Sipil / KEPO "Kependudukan Efektif Pelayanan Oke" (Inovasi Pelayanan Kependudukan Online)	1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan 2. Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor. 98.b Tahun 2022 Tentang Penetapan Inovasi Daerah	2024-2026	1. Gedung Database	2024-2026	1. Aplikasi SIAK 2. Aplikasi KEPO	2024-2026	1. Sosialisasi	2024-2026
	G.1.4.1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan	G.1.4.1.1. Program peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan melalui Sosialisasi/Bimbingan Teknis	Sosialisasi dan bimbingan teknis peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan	2024-2026	Jaringan Internet	2024-2026	Laptop	2024-2026	Sosialisasi kepada pemerintah kecamatan	2024-2026
	G.1.4.2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan	G.1.4.2.1. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana kelurahan	Sistem pelayanan masyarakat berbasis digital dan perbaikan sarana prasarana	2024-2026	Jaringan Internet	2024-2026	Laptop	2024-2026	Sosialisasi kepada pemerintah kelurahan dan masyarakat	2024-2026



SUB-DIMENSI	STRATEGI	INOVASI KEGIATAN/PROGRAM	RENCANA AKSI/TAHUN							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	sarana dan prasarana Kelurahan.									
	G.1.5.1. Promosi Investasi Daerah	G.1.5.1.1. Program Promosi Penanaman Modal	Pengurusan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Online Single Submission (OSS)	2024 - 2034	Jaringan Internet	2024 - 2034	Laptop	2024 - 2034	Sosialisasi kepada Pelaku Usaha	2024 - 2034
G.2. Birokrasi yang efisien	G.2.1.1. Peningkatan Standar Kompetensi Sumber Daya Aparatur	G.2.1.1.1. Program Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS dan CPNS	Pembuatan Rancangan Surat Keputusan Walikota terkait pelaksanaan kegiatan, SOP	2024 - 2034	Gedung , Instruktur Diklat	2024 - 2034	Website BKPP	2024 - 2034	Pembelajaran dalam Diklat PIM dan Latsar bagi CPNS, Sosialisasi lewat Banner / Stiker / Link	2024 - 2034
		G.2.1.1.2. Pemberian Bantuan Tugas Belajar bagi PNS	Pembuatan Rancangan SK Walikota ttg pembayaran Tugas Belajar dan MOU	2024 - 2034	Bukti - bukti pertanggungjawaban	2024 - 2034	Website BKPP	2024 - 2034	Sosialisasi penerimaan calon PNS Tugas Belajar	2024 - 2034
		G.2.1.1.3. Pelaksanaan kegiatan ujian dinas Kenaikan pangkat pindah ruang dan penyesuaian Ijazah serta Uji Potensi dan Kompetensi	Pembuatan Rancangan SK Walikota	2024 - 2034	SDM	2024 - 2034	Assesor	2024 - 2034	Pelaksanaan Assesment bagi PNS	2024 - 2034



SUB-DIMENSI	STRATEGI	INOVASI KEGIATAN/PROGRAM	RENCANA AKSI/TAHUN							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	G.2.1.2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi aparatur sesuai dengan potensi dan kompetensi	G.2.1.2.1. Melakukan penempatan ASN sesuai dengan Potensi dan Kompetensi serta pengadaan ASN berdasarkan kebutuhan OPD	Pembuatan Rancangan SK Walikota tentang Tim Seleksi	2024 - 2034	UU ASN	2024 - 2034	Computer Assisted Test	2024 - 2034	Sosialisasi dan Pelaksanaan Seleksi bagi PNS dalam menduduki jabatan tertentu	2024 - 2034
	G.2.1.3. Penerapan pelayanan kepegawaian yang transparan, cepat dan tepat	G.2.1.3.1. Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi (SIPASTI)	Perwako SIPASTI	2024 - 2034	Jaringan Internet	2024 - 2034	Pengembangan fitur pada Aplikasi Penunjang penilaian kinerja ASN.	2024 - 2034	Sosialisasi SIPASTI	2024 - 2034
	G.2.1.4. Terdapat Lembaga Bantuan Hukum KORPRI untuk pendampingan litigasi maupun non litigasi bagi Anggota KORPRI	G.2.1.4.1. Program Pembentukan Dewan Pengurus KORPRI Kota Kotamobagu yang memiliki Program Kerja untuk perlindungan dan kesejahteraan anggotanya	Perwako tentang Dewan Pengurus KORPRI	2024 - 2034	Rancangan Kerja Dewan Pengurus KORPRI	2024 - 2034	-	-	Pemberian bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi kepada Anggota KORPRI	2024 - 2034
	G.2.2.1. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi;	G.2.2.1.1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Regulasi Perubahan Penggunaan SIPD, SK Tim Pembina Penatausahaan Keuangan, SK Tim Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan	2024 - 2034	SDM, Perangkat Lunak, Regulasi	2024 - 2034	PC/komputer, admin	2024 - 2034	Fasilitasi/ Pendampingan Penggunaan SIPD, SK Tim Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan, Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan PD	2024 - 2034



SUB-DIMENSI	STRATEGI	INOVASI KEGIATAN/PROGRAM	RENCANA AKSI/TAHUN							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	G.2.3.1. Melaksanakan Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan PD berbasis akrual secara berkala	G.2.3.1.1. Program pelatihan terkait Penyusunan Laporan Keuangan PD	Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Laporan Keuangan PD	2024	1. Laptop/komputer.	2023-2028	SDM	2024	Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan PD	2024
	G.2.3.2. Melaksanakan inventarisasi Aset Daerah	G.2.3.2.1. Si Baper	SK Penatausahaan Barang	2024 - 2034	SDM, Perangkat Lunak	2024 - 2034	PC/ Komputer, Admin	2024 - 2034	Fasilitasi/ Pendampingan bagi Pengurus Barang	2024-2034
	G.2.3.3. Melakukan sertifikasi penilai BMD	G.2.3.3.1. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	SK Inventarisasi Aset Daerah dan SK Tim Penilai BMD	2024 - 2034	SDM, Perangkat Lunak	2024 - 2034	PC/ Komputer, Admin	2024 - 2034	Fasilitasi/ Pendampingan dari KPKNL	2024-2034
	G.2.3.4. Pelaksanaan pendataan massal objek pajak	G.2.3.4.1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	SK Tim Pendataan Objek Pajak dan Mengembangkan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis IT	2024 - 2034	SDM, Perangkat Lunak	2024 - 2034	PC/ Komputer, Admin	2024 - 2034	Sosialisasi pendataan pajak bagi objek pajak, Sosialisasi bagi masyarakat terkait aplikasi pengelolaan pendapatan daerah	2024-2034
	G.2.3.5. Pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	G.2.3.5.1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah berbasis IT	Pembentukan Tim Kerja . Pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	2024 - 2034	SDM, Perangkat Lunak	2024 - 2034	PC/ Komputer, Admin	2024 - 2034	Sosialisasi pendataan daerah berbasis IT	2024-2034
	G.2.4.1. Memberikan daya dukung internal yang cukup untuk menyiapkan fasilitasi	G.2.4.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penambahan SDM	2024 - 2034	ASN	2024 - 2034	-	-	Diklat Perancang Perundang-Undangan	2024 - 2034



SUB-DIMENSI	STRATEGI	INOVASI KEGIATAN/PROGRAM	RENCANA AKSI/TAHUN							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	terhadap agenda DPRD									
	G.2.5.1. Pelaksanaan <i>E-goverment</i>	G.2.5.1.1. Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Peningkatan Aplikasi pelayanan yang mudah digunakan. 2. Integrasi data/ Informasi/ aplikasi	2024-2028	1. Komputer 2. Server 3. Jaringan	2024-2028	1. jaringan data/ internet/ intranet 2. SDM	2024-2028	1. Peningkatan SDM 2. Sosialisasi 3. Pengelolaan Berkelanjutan	2024-2028
	G.2.5.2. Pengembangan Basis Data Pembangunan Daerah	G.2.5.2.1. Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi	Mengembangkan sistem Basis Data berbasis IT	2024-2034	SDM	2024-2034	PC, Admin dan Website	2024-2034	Sosialisasi	2024-2034
	G.2.6.1. Meningkatkan predikat nilai Sakip Kota Kotamobagu	G.2.6.1. Prohram peningkatan dukungan tehnik administrasi dan analisis urusan pemerintahan	1. Peningkatan Aplikasi pelayanan yang mudah digunakan. 2. Integrasi data/ Informasi/ aplikasi	2024-2034	1. Komputer 2. Server 3. Jaringan	2024-2034	1. jaringan data/ internet/ intranet 2. SDM	2024-2034	1. Peningkatan SDM 2. Sosialisasi 3. Pengelolaan Berkelanjutan	2024-2034
G.3. Kebijakan Publik	G.3.1.1. Meningkatkan mutu pelayanan hukum sesuai sistem tata kelolah pemerintah yang baik	G.3.1.1.1. Simppuh ("Melakukan peningkatan mutu pelayanan hukum dan sumber daya manusia sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance)")	SK SIMPPUH	2024 - 2034	PC	2024 - 2034	laptop, admin dan website	2024 - 2034	Diklat perancang perundang-undangan sosialisasi Simppuh	2024-2034



SUB-DIMENSI	STRATEGI	INOVASI KEGIATAN/PROGRAM	RENCANA AKSI/TAHUN							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	G.3.2.1. Penyusunan peraturan pendukung terkait pelayanan perizinan dan penanaman modal	G.3.2.1.1. Program penyusunan peraturan pendukung Penanaman Modal dan Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota.	1. Deregulasi kebijakan daerah yang sesuai dengan kearifan lokal di bidang perizinan dan penanaman modal 2. Sosialisasi kepada Masyarakat.	2024 - 2034	1.Jaringan internet 2.Komputer jaringan 3.Sarana dan prasarana	2024 - 2034	SDM	2024 - 2034	Peningkatan SDM pengelola perizinan dan penanaman modal	2024 - 2034

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023



**4.2. RENCANA AKSI *SMART BRANDING***

Dalam upaya perwujudan program-program dalam *smart branding*, terdapat beberapa hal yang menjadi indikator dalam terlaksananya program yakni *tourism branding*, *business branding*, serta *city appearance branding*. Dalam rencana aksi *smart branding*, pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahap disesuaikan dengan program yang akan dilaksanakan. Adapun rencana aksi *smart branding* Kota Kotamobagu sebagai berikut.

**Tabel 4. 2**  
**Rencana Aksi *Smart Branding* Kota Kotamobagu**

SUB-DIMENSI	STRATEGI	INOVASI KEGIATAN/PROGRAM	RENCANA AKSI/TAHUN							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
B.1. Pariwisata	B.1.1.1. Promosi dan <i>Mix Marketing</i> pariwisata daerah berbasis Teknologi Informasi ( <i>By Phone</i> )	B.1.1.1.1. Perancangan dan Pemanfaatan Website Pariwisata Kotamobagu	Pembentukan Tim Kerja Infokom Pariwisata	2024	1. Laptop/komputer. 2 software web.	2023-2028	SDM (Perancang Web)	2024	Sosialisasi Pok Darwis dan Pelatihan Operator Website	2024
		B.1.1.1.2. Kerjasama Pariwisata dengan market place (Traveloka dan Toko Pedia)	Pembentukan Tim kerja sama Pengembangan Pariwisata	2024	2. Dokumen standar kerjasama	2024	1 Tim Force	2024	2. promosi dan digital marketing	2024



SUB-DIMENSI	STRATEGI	INOVASI KEGIATAN/PROGRAM	RENCANA AKSI/TAHUN							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
B.2. Kemudahan Pelaksanaan Bisnis	B.2.1.1. Pemberdayaan Budaya lokal Daerah Bolaang Mongondow	B.2.1.1.1. Pemberdayaan budaya lokal menjadi daya tarik wisata	1. Kebijakan Penguatan Budaya Lokal, 2. Penguatan dan pemberdayaan Sanggar Budaya	2024	1. Gedung Kesenian, 2. instrumen dan peralatan menunjang kesenian, 3. sanggar dan seni budaya	2024	Pelatih/ instruktur Seni dan Budaya	2024	sosialisasi dan Pelatihan Seni dan Budaya	2024
B.3. Wajah Kota	B.3.1.1. Peningkatan Kualitas Produk Lokal	B.3.1.1.1. Sertifikasi Produk Pendukung jasa Pariwisata, seperti kuliner, perhotelan, dan produk lainnya	Lembaga Sertifikasi Produk	2024	TUK Produk	2024	Asesor	2024	Sosialisasi dan Pelatihan Sertifikasi	2024
	B.3.2.1 Pengelolaan pariwisata dengan Pendekatan Parnetship	B.3.2.1.1. Pengelolaan pariwisata berkerjasama dengan berbagai pihak terkait (Swasta dan BUMD/BUMN)	1. Dokumen Standar pengelolaan pariwisata; 2. Fakta Integritas kerjasama	2024	1. Dokumen standar kerjasama 2. MoU, 3. MOA, 4. Amenitas	2024	1 Tim Pelaksana	2024	Sosialisasi CHSE	2024
	B.3.3.1. Membangun jaringan Infrastruktur Pariwisata yang memudahkan wisatawan	B.3.3.1.1. Jaringan transportasi darat dan udara yang mendukung aksesibilitas pariwisata	1. Pembangunan Bandara; 2. Pembangunan jaaringan jalan raya, 3. Pembangunan jaringan kelistrikan. 4. penyediaan sanitasi	2024-2028	1. lahan pembangunan Bandara, 2. jaringan jalan raya,	2024	SDM	2024	Sosialisasi	2024



SUB-DIMENSI	STRATEGI	INOVASI KEGIATAN/PROGRAM	RENCANA AKSI/TAHUN							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	B.3.4.1. Peningkatan keterampilan (mutu SDM) yang menunjang Kualitas pelayan Pariwisata	B.3.4.1.1. Sertifikat kompetensi pelayan jasa wisata bekerja sama dengan balai latihan kerja	Perda Sertifikasi Kompetensi pelayan Wisata	2024	BNSP dan BLK	2024	Asesor	2024	Sosialisasi, Pelatihan dan Bimtek	2024

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023



**4.3. RENCANA AKSI SMART SOCIETY**

Sebagai upaya perwujudan dari dimensi *smart society*, terdapat beberapa sub-dimensi yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan *smart society* diantaranya adalah mewujudkan sistem keamanan masyarakat (*security*), mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien (*community*), membangun ekosistem belajar yang efisien (*learning*). Di dalam rencana aksi *smart Society* dari Kota Kotamobagu ini terbagi menjadi beberapa tahapan pelaksanaan disesuaikan dengan urgensi dan prioritas pembangunan antara lain sebagai berikut

**Tabel 4. 3**

**Rencana Aksi *Smart Society* Kota Kotamobagu**

SUB-DIMENSI	STRATEGI	INOVASI KEGIATAN/PROGRAM	RENCANA AKSI/TAHUN							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
S.1. Interaksi Masyarakat yang Efisien	S.1.1.1. Menyelenggarakan Pelatihan dan Pembinaan	S.1.1.1.1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1. Permendes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	2023	1. SDM	2023	1. Akses Website Desa	2023	1. Sosialisasi tentang Website Desa	2023
S.2. Ekosistem Belajar	S.2.1.1. Pengadaan buku-buku bacaan baru	S.2.1.1.1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan	2023	1. Buku-buku	2023	-	2023	1. Penambahan Buku-buku terbaru	2023



SUB-DIMENSI	STRATEGI	INOVASI KEGIATAN/PROGRAM	RENCANA AKSI/TAHUN							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	S.2.2.1. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	S.2.2.1.1. Meningkatkan Alat Praktik Peraga dan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia	Pengadaan buku baik tercetak maupun digital	2023	1. Laptop, Tablet, Komputer	2023	Jaringan Internet	2023	1. Penambahan Sarana dan Prasarana seperti Laptop, Tablet dan Komputer	2023
S.3. Sistem Keamanan dan keselamatan Masyarakat	S.3.1.1. Meningkatkan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak	S.3.1.1.1. Mengkoordinasi Gugus Tugas KLA	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak	2019	dst	2019	dst	2019	1. Sosialisasi 2.FAD 3.	2019
	S.3.2.1. Meningkatkan kualitas SDM, lembaga dan kuantitas sarana prasarana untuk pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan.	S.3.2.1.1. PECAH PUSPAGA "Pelayanan Pembinaan Pranikah Calon Pengantin di Puspaga"	PERDA Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan	2018-2023	1. Gedung 2. SDM (Tenaga Ahli, Tenaga Rohaniawan dan Tenaga Administrasi)	2018-2023	-	2018-2023	1. Sosial Media PUSPAGA Kotamobagu	2023
	S.3.3.1. Meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal kepada korban kekerasan	S.3.3.1.1. Pendampingan UPTD PPA	PERWA NO 44 TAHUN 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kelas B		2020	3.3 1. Gedung 2. SDM (ASN, Tenaga Ahli)	2024 - 2034	Jaringan Internet	2024 - 2034	2. Sosial Media UPTD PPA



SUB-DIMENSI	STRATEGI	INOVASI KEGIATAN/PROGRAM	RENCANA AKSI/TAHUN							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	S.3.4.1. Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	S.3.4.1.1. Program penanggulangan bencana, Penguatan Kapasitas Mitigasi Bencana serta program pencegahan dan kesiapsiagaan	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana		1. Mobil Operasional 2. Dapur Umum 3. Gudang Logistik 4. SDM	2023	<a href="https://bpbd.kotamobagu.go.id/">website Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Kotamobagu</a>	2023	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi kebencanaan 2. Pelatihan 3. Bimtek	2023
	S.3.5.1. Pemenuhan SDM yang berkualitas	S.3.5.1.1. Penguatan Kapasitas Mitigasi Bencana	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana		1. Mobil Operasional 2. Dapur Umum 3. Gudang Logistik 4. SDM	2023	<a href="https://bpbd.kotamobagu.go.id/">website Badan Penanggulang an Bencana daerah Kota Kotamobagu</a>	2023	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi kebencanaan 2. Pelatihan 3. Bimtek	2023
	S.3.5.2. Sarana Prasarana yang memadai	S.3.5.2.1. Program pencegahan dan kesiapsiagaan	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana		1. Mobil Operasional 2. Dapur Umum 3. Gudang Logistik 4. SDM	2023	<a href="https://bpbd.kotamobagu.go.id/">website Badan Penanggulang an Bencana daerah Kota Kotamobagu</a>	2023	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi kebencanaan 2. Pelatihan 3. Bimtek	2023

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023



**4.4. RENCANA AKSI *SMART LIVING***

Pada komponen *smart living*, terdapat beberapa unsur yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan *smart city* Kota Kotamobagu diantaranya harmonisasi tata ruang wilayah (*harmony*), menjamin ketersediaan sarana transportasi (*mobility*), serta mewujudkan prasarana kesehatan (*health*). Di dalam rencana aksi *smart living* dari Kota Kotamobagu ini terbagi menjadi beberapa tahapan pelaksanaan disesuaikan dengan urgensi dan prioritas pembangunan antara lain sebagai berikut.

**Tabel 4. 4**

**Rencana Aksi *Smart Living* Kota Kotamobagu**

SUB-DIMENSI	STRATEGI	INOVASI KEGIATAN/PROGRAM	RENCANA AKSI/TAHUN							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Lv.1. Harmonisasi Tata Ruang	Lv.1.1.1. Mewujudkan harmonisasi lingkungan dan infrastruktur yang handal	Lv.1.1.1.1. Pengembangan Layanan Pengendalian dan Pemantauan Alat Penerangan Jalan	- Peraturan Walikota terkait Pengendalian dan Pemantauan Alat Penerangan Jalan - SK Tim Kerja	2022	- SDM - Infrastruktur Listrik	2022	- Pengembangan Aplikasi Pengendalian dan Pemantauan Alat Penerangan Jalan - <i>Hardware smart breaker</i>	2022	Sosialisasi tentang Aplikasi Pengendalian dan Pemantauan Alat Penerangan Jalan	2022



SUB-DIMENSI	STRATEGI	INOVASI KEGIATAN/PROGRAM	RENCANA AKSI/TAHUN							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Lv.1.1.2. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak	Lv.1.1.2.1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1. Dokumen Rencana Pencegahan Peningkatan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 2. PermenPUPR No.07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	2023	- SDM - SDM Surveyor	2023	Website Dinas PRKP Kotamobagu	2023	- Dokumen RP2KPKPK - FGD	2023
Lv.2. Sarana/Prasarana Kesehatan	Lv.2.1.1. Pemenuhan akses dan informasi kesehatan	Lv.2.1.1.1. Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan yang berkualitas	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kotamobagu No. 16 Tahun 2023 tentang Admin Pengelola Website SKPD	2023	SDM	2023	Website Dinas Kesehatan Kotamobagu Media sosial Dinas Kesehatan Kotamobagu	2023	Sosialisasi Melalui Media online atau offline	2023
Lv.3. Sarana/Prasarana Transportasi	Lv.3.1.1. Pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	Lv.3.1.1.1. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Peraturan Daerah Kota kotamobagu No 05Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2019	- SDM - Balai Pengujian	2005	Website E-KIR Kotamobagu	2022	Sosialisasi melalui website daerah	2022

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023



**4.5. RENCANA AKSI SMART ECONOMY**

Dalam dimensi *smart economy*, terdapat beberapa dimensi pendukung yang menjadi tujuan dalam penyelenggaraan *smart city* di Kota Kotamobagu antara lain membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*industry*), mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfare*), serta membangun ekosistem transaksi keuangan (*transaction*). Dalam rencana aksi *Smart Economy*, pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahap disesuaikan dengan program yang akan dilaksanakan. Adapun rencana aksi *smart economy* Kota Kotamobagu sebagai berikut.

**Tabel 4. 5**

**Rencana Aksi Smart Economy Kota Kotamobagu**

SUB-DIMENSI	STRATEGI	INOVASI KEGIATAN/PROGRAM	RENCANA AKSI/TAHUN							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Ec.1. Industri Berdaya Saing	Ec.1.1.1. Inovasi berbasis penelitian, Pendekatan berbasis ekosistem, pengembangan SDM terpadu, Meningkatkan kualitas pemasaran dan pengelolaan produk dengan membangun sentra-sentra industri. serta memaksimalkan penggunaan teknologi digital	Ec.1.1.1.1. Tersediannya informasi lapangan kerja yang mudah di akses, diadakannya pelatihan ketenagakerjaan, program pemagangan serta dilaksanakannya <i>jobfair</i> ; Membangun sentra-sentra industri dan memaksimalkan penggunaan teknologi digital dalam melakukan promosi	1. membuat Perwako Terkait invoasi kebijakan Platform Informasi Ketenagakerjaan 2. Menjalin kerjasama dan kermitraan dengan perusahaan dan lembaga pelatihan 3. Sertifikasi Berbasis Kompetensi 4. Dana Pendidikan dan Pelatihan	2024	1. Balai Pelatihan Kerja (BLK), 2.Sentra Industri dan Sentra kemasan	2024	Server dan Website	2025	1.	2025



SUB-DIMENSI	STRATEGI	INOVASI KEGIATAN/PROGRAM	RENCANA AKSI/TAHUN							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			5. Program Subsidi dan Insentif 6. Membangun Sentra Pengolahan Industri 7. Sertifikasi Produk IKM							
Ec.2. Kesejahteraan Masyarakat	Ec.2.1.1. Percepatan pengurangan jumlah penduduk miskin	Ec.2.1.1.1. Mengintegrasikan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan memakai data angka kemiskinan yang valid yang berasal dari satu sumber	1. Kebijakan Kesehatan dan Jaminan Sosial 2. Program Bantuan Sosial yang Efektif 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal	2024	2. Balai Pemberdayaan Masyarakat	2024	2. Sosial media	2025	2.	2025
Ec.3. Transaksi Keuangan	Ec.3.1.1. Penerapan penggunaan dompet digital / <i>fintech</i>	Ec.3.1.1.1. Memasyarakatkan pembayaran secara digital/fintech pada penjual-penjual lokal	1. Menjalin kerjasama dengan Bank dan lembaga keuangan non Bank yang memiliki pembayaran digital/fintech	2024	3. Koneksi internet	2024	3. Handphone/mesin EDC	2025	3.	2025

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023



**4.6. RENCANA AKSI *SMART ENVIRONMENT***

Terdapat 3 unsur pembentuk dalam *smart environment* antara lain mengembangkan program proteksi lingkungan (*protection*), mengembangkan tata kelola sampah dan limbah (*waste*), mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung-jawab (*energy*). Dalam rencana aksi *smart environment*, pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahap disesuaikan dengan program yang akan dilaksanakan. Adapun rencana aksi *smart environment* Kota Kotamobagu sebagai berikut.

**Tabel 4. 6**

**Rencana Aksi *Smart Environment* Kota Kotamobagu**

SUB-DIMENSI	STRATEGI	INOVASI KEGIATAN/PROGRAM	RENCANA AKSI/TAHUN							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
En.1. Perlindungan Lingkungan Hidup	En.1.1.1. Penguatan pengawasan dan penindakan pencemaran lingkungan secara kolaboratif	En.1.1.1.1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1. PP No.5/2021, PP No. 22/2021, PP No. 23/2021, PP No. 27/2020	2021	Regulasi tentang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2021	Website Dinas Lingkungan Hidup Kotamobagu	2021	Sosialisasi dan monitoring	2021
		En.1.1.1.2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5. Perwako No 34 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai KotaBISA Award Kota Kotamobagu PP N0 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan sanitasi Perwako No 112 Tahun 2021	2021	Pemenuhan Data Indikator sebagai standart penilaian melalui mekanisme dan regulasi yang sudah ditetapkan	2021	POKJA PKP (Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman )	2021	Penilaian, Monitoring dan Evaluasi	2021



SUB-DIMENSI	STRATEGI	INOVASI KEGIATAN/PROGRAM	RENCANA AKSI/TAHUN								
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
			Tentang Penetapan Pemenang Penganugerahan Kota BISA Award								
En.2. Pengelolaan Sampah dan Limbah	En.2.1.1. Optimalisasi pengelolaan daur ulang sampah dan pemanfaatan zero waste	En.2.1.1.1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2. PP No. 22/2021 dan Permen KLH No. 27/2021	2021	2. Laboratorium Lingkungan (jasa swasta)	2021	<a href="http://ppl.kl.kotamobagu.go.id">Aplikasi IKLH ppl.kl.kotamobagu.go.id</a>	2021	-	-	
En.3. Tata kelola Energi	En.3.1.1. Pengembangan energi alternatif	En.3.1.1.1. Program Penghargaan Lingkungan Hidup	3. PP 52/2019, PP 53/2019	2019	-	-	Aplikasi siDIA	-	-	-	
		En.3.1.1.2. Program Pengelolaan Persampahan	4. 1. PP No. 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah	2022	4. TPA, TPST, TPS3R	-	-	-	-	-	

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023

## PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY* KOTA KOTAMOBAGU

Dalam melaksanakan program *smart city* secara bertahap selaras dengan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023, maka dirumuskan melalui peta jalan (*road map*) dalam jangka pendek 3 tahun, jangka menengah 5 tahun dan jangka panjang 10 tahun. Selanjutnya untuk memberikan akselerasi pengembangan *smart city*, maka ditentukan *quick wins* yang ditetapkan dalam jangka 1 tahun dengan melaksanakan sebagian dari program jangka pendek.

Berikut merupakan peta jalan pembangunan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Kotamobagu pada masing-masing dimensi *smart city*.



**5.1. PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART GOVERNANCE**

**Tabel 5. 1**

**Peta Jalan Smart Governance Kota Kotamobagu**

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI 37122	INOVASI	TARGET KINERJA/ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
G.1. Pelayanan Publik	G.1.1.1. Promosi Investasi Daerah	Program Promosi Penanaman Modal/ Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang diikuti	21.3. Waktu rata-rata untuk persetujuan izin bangunan (hari)	SI JOSS (Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal)	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	APBD	DPMPPTSP
	G.1.1.2. Bimbingan Teknis kepada pelaku Usaha terkait OSS dan LKPM	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal/ Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Usahanya	Jumlah Usaha yang dipantau (Kegiatan)	21.3. Waktu rata-rata untuk persetujuan izin bangunan (hari)	SI JOSS (Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal)	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	APBD	DPMPPTSP



SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI 37122	INOVASI	TARGET KINERJA/ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	G.1.1.3. Memudahkan Investasi PMA/PMDN untuk Berinvestasi sesuai dengan potensi dan kesesuaian Ruang.	Program promosi tentang berinvestasi sesuai potensi dan kesesuaian ruang	Peningkatan investasi sesuai potensi dan kesesuaian ruang	21.3. Waktu rata-rata untuk persetujuan izin bangunan (hari)	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	APBD	DPMPSTP
	G.1.2.1. Menerapkan pembinaan penatausahaan keuangan bagi PD dan aparat Desa melalui Sosialisasi/Bimbingan Teknis;	Program pembinaan penatausahaan keuangan bagi PD dan aparat Desa	Presentase PD dan aparat desa yang terampil dalam penatausahaan keuangan	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	APBD	DPMPSTP
	G.1.3.1.. Menciptakan perilaku masyarakat yang tangguh dan amanah	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Kinerja dan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.4. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital	KEPO DUKCAPIL "Kependudukan Efektif Pelayanan Oke" (Inovasi Pelayanan Kependudukan Online)	V	1202400 00	V	133030 000	V	1460000 00	V	146000 000	V	1460000 00	APBD	DISDUKCA PIL



SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI 37122	INOVASI	TARGET KINERJA/ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	G.1.4.1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan	Program peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan melalui Sosialisasi/Bimbingan Teknis	Presentase kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan	5.4. Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-		
	G.1.4.2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sarana dan prasarana Kelurahan.	Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana kelurahan	Kondisi sarana prasarana kelurahan	5.4. Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-		
	G.1.5.1. Promosi Investasi Daerah	Program Promosi Penanaman Modal/Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang diikuti	21.3. Waktu rata-rata untuk persetujuan izin bangunan (hari)	SIJOSS (Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal)	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	APBD	DPMPSTP



SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI 37122	INOVASI	TARGET KINERJA/ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
G.2. Birokrasi yang Efisien	G.2.1.1. Peningkatan Standar Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang lulus kompetensi dan ditempatkan pada posisi yang sesuai	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Pengembangan Kompetensi Teknis	V	308.100.000	V	308.100.000	V	308.100.000	V	308.100.000	V	308.100.000	DAU	BKPP
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, Ujian Dinas serta Uji Potensi dan Kompetensi		Pengembangan Kompetensi ASN	V	300.000.000	V	350.000.000	V	350.000.000	V	350.000.000	V	350.000.000	DAU	BKPP
	G.2.1.2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi aparatur sesuai dengan potensi dan kompetensi	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penempatan Jabatan sesuai kompetensi	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Mutasi dan Promosi ASN	V	400.000.000	V	400.000.000	V	400.000.000	V	400.000.000	V	400.000.000	DAU	BKPP



SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI 37122	INOVASI	TARGET KINERJA/ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	G.2.1.3. Penerapan pelayanan kepegawaian yang transparan, cepat dan tepat	Program Kepegawaian Daerah	Persentase kualitas layanan kepegawaian secara elektronik	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	SIPASTI (Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi)	V	3.300.000	V	3.300.000	V	3.300.000	V	3.300.000	V	3.300.000	DAU	BKPP
	G.2.1.4. Terdapat Lembaga Bantuan Hukum KORPRI untuk pendampingan litigasi maupun non litigasi bagi Anggota KORPRI	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang difasilitasi secara hukum	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	V	150.000.000	V	150.000.000	V	150.000.000	V	150.000.000	V	150.000.000	DAU	BKPP
	G.2.2.1. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi;	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah (jumlah barang)	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri	Si-Baper Sistem Informasi Barang Persediaan	v	71.607.000	v	75.167.700	v	79.728.400	v	84.728.400	V	89.728.400	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPKD



SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI 37122	INOVASI	TARGET KINERJA/ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	G.2.3.1. Melaksanakan Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan PD berbasis akrual secara berkala	Program pelatihan terkait Penyusunan Laporan Keuangan PD	Tersusunnya Laporan Keuangan PD	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-		
	G.2.3.2. Melaksanakan inventarisasi Aset Daerah	Si Baper	Terlaksananya inventarisasi Aset Daerah	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-		
	G.2.3.3. Melakukan sertifikasi penilai BMD	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-		



SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI 37122	INOVASI	TARGET KINERJA/ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	G.2.3.4. Pelaksanaan pendataan massal objek pajak	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terwujudnya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-		
	G.2.3.5. Pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah berbasis IT	Terwujudnya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah berbasis IT	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-		
	G.2.4.1. Memberikan daya dukung internal yang cukup untuk menyiapkan fasilitasi terhadap agenda DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi Layanan dukungan Administrasi Kesekretariatan sesuai SOP, serta Indeks Kepuasan Layanan Terhadap Anggota DPRD	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	-	v	2.073.92 6.428	v	2.073.9 26.428	v	2.173.92 6.428	v	2.173.9 26.428	v	2.173.92 6.428	DAU	Sekretariat Dewan



SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI 37122	INOVASI	TARGET KINERJA/ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	G.2.5.1. Pelaksanaan E-government	Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya e-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-		
G.2.5.2. Pengembangan Basis Data Pembangunan Daerah	Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi	Penjabaran Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Eplanning, E Monev	100	1,401,209,100	100	1,269,600,000	100	1,536,100,000	100	-	V	-	APBD	Bappelitbang da	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Presentase kebijakan penelitian dan pengembangan	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	IGA (Inovation Government Award)	100	473,410,600	100	603,750,000	100	896,500,000	100	-	100	-	APBD	Bappelitbang da	



SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI 37122	INOVASI	TARGET KINERJA/ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	G.2.6.1. Meningkatkan predikat nilai Sakip Kota Kotamobagu	Prohram peningkatan dukungan teknis administrasi dan analisis urusan pemerintahan	Presentase dukungan teknis administrasi dan analisis urusan pemerintahan	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-		
G.3. Kebijakan Publik	G.3.1.1. Meningkatkan mutu pelayanan hukum sesuai sistem tata kelolah pemerintah yang baik	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	1.Persentase Kepastian Hukum 2. Persentase produk hukum daerah yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Layanan Kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring ataupun yang tidak dapat di akses secara online yaitu layanan Bantuan Hukum untu pemerintah dan masyarakat miskin	Simppuh (Sistem Informasi Penyusunan Produk Hukum)	v	757.368.200	v	757.368.200	v	760.000.000	v	760.000.000	v	760.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bagian Hukum
	G.3.2.1. Penyusunan peraturan pendukung terkait pelayanan perizinan dan penanaman modal	Program penyusunan peraturan pendukung Penanaman Modal dan Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota.	Peraturan pendukung terkait pelayanan perizinan dan penanaman modal	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-		

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023



**5.2. PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART BRANDING**

**Tabel 5. 2**

**Peta Jalan Smart Branding Kota Kotamobagu**

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI 37122	INOVASI	TARGET KINERJA/ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
B.1. Pariwisata	B.1.1.1. Promosi dan <i>Mix Marketing</i> pariwisata daerah berbasis Teknologi Informasi ( <i>By Phone</i> )	Perancangan dan Pemanfaatan Website Pariwisata Kotamobagu	1. Terbentuknya website pariwisata serta pemanfaatannya	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri	-	1. Website	Rp10.000.000	V	-	V	-	V	-	V	-	APBD	DINAS PARIWISATA
		Kerjasama Pariwisata dengan market place (Traveloka dan Tokopedia)	1. Terbentuk kerjasama market place (traveloka dan Tokopedia)	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri	-	1. Market place	Rp15.000.000	V	Rp17.000.000,00	V	-	V	-	V	-	APBD	DINAS PARIWISATA
B.2. Kemudahan Pelaksanaan Bisnis	B.2.1.1. Pemberdayaan Budaya lokal Daerah Bolaang Mongondow	Pemberdayaan budaya lokal menjadi daya tarik wisata	1. Dibangun Balai Pusat Kesenian Khas Daerah 2. Menerapkan penggunaan batik Sikayu pada semua instansi baik Pemerintah maupun swasta 3. Melakukan pelatihan pembuatan Kabela dan Lapu-lapi 4. Festival Seni Budaya Daerah (Kuliner, Kejawanan, Kesenian, dll)	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri	-	1. 1 unit bangunan 2. 70% penggunaan batik Sikayu 3. 66 orang 4. Tiap tahun	Rp1.500.000.000	V	Rp1.500.000.000,00	V	-	V	-	V	-	APBD	DINAS PARIWISATA



SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI 37122	INOVASI	TARGET KINERJA/ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
B.3. Wajah Kota	B.3.1.1. Peningkatan Kualitas Produk Lokal	Sertifikasi Produk Pendukung jasa Pariwisata, seperti kuliner, perhotelan, dan produk lainnya	1. Meningkatnya jumlah usaha yang disertifikasi	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri	-	1. 100 Sertifikat	Rp100.000.000	1. 50 sertifikat	Rp60.000.000,00	V	-	V	-	V	-	APBD	DINAS PARIWISATA
	B.3.2.1 Pengelolaan pariwisata dengan Pendekatan Parnetship	Pengelolaan pariwisata bekerjasama dengan berbagai pihak terkait (Swasta dan BUMD/BUMN)	1. Melakukan Festival sen dan budaya daerah 2. Membangun tempat objek wisata yang ada di Desa dengan bekerjasama dengan Pemerintah Desa (Bukit Bambean di Desa Sia, Air Terjun Molipung di Desa Kobo Kecil, Hutan Kota Bonawang di Kel. Mongkonai)	5.4. Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan	-	setiap tahun 1 objek wisata	Rp200.000.000	V	Rp2.000.000.000,00	V	-	V	-	V	-	APBD	DINAS PARIWISATA
	B.3.3.1. Membangun jaringan Infrastruktur Pariwisata yang memudahkan wisatawan	Jaringan transportasi darat dan Udara yang mendukung aksesibilitas pariwisata	1. Memperbaiki akses jalan yang rusak 2. Membangun akses jalan di wilayah yang belum tersentuh (belum ada akses jalan yang memadai) 3. Membuat papan penunjuk jalan	5.4. Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan	-	1. 2 Kilo Meter 2. 2 kilo Meter 3. 10 papan penunjuk jalan ...	Rp1.000.000.000	V	Rp1.000.000.000,00	V	-	V	-	V	-	APBD	DINAS PARIWISATA
	B.3.4.1. Peningkatan keterampilan (mutu SDM) yang menunjang Kualitas pelayanan Pariwisata	Sertifikat kompetensi pelayan jasa wisata bekerja sama dengan balai latihan kerja	1. Sertifikat kemampuan Bahasa Asing (Bahasa Inggris, Mandarin, dll) 2. Sertifikat Pemandu Wisata	14.1. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	-	2. 5 sertifikat 3. 2 ...	Rp50.000.000	V	Rp60.000.000,00	V	-	V	-	V	-	APBD	DINAS PARIWISATA

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023



**5.3. PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART SOCIETY**

**Tabel 5. 3**

**Peta Jalan Smart Society Kota Kotamobagu**

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI 37122	INOVASI	TARGET KINERJA/ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
S.1. Interaksi Masyarakat yang Efisien	S.1.1.1. Menyelenggarakan Pelatihan dan Pembinaan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	-	V	1061901777	V	2289222752	V	1250000000	V	1250000000	V	1250000000	APBD	Dinas PMD
S.2. Ekosistem Belajar	S.2.1.1. Pengadaan buku-buku bacaan baru	Koleksi Buku Yang tersedia di Perpustakaan Daerah	17.3 Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk	17.3. Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	V	550000000	V	925000000	V	1832095350	V	1832095350	V	1832095350	APBD	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	S.2.2.1. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	Meningkatnya Alat Praktik Peraga dan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia	17.4. Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif	17.4. Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	APBD	DINAS PENDIDIKAN
S.3. Sistem Keamanan dan keselamatan Masyarakat	S.3.1.1. Meningkatkan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	-	V	Rp. 128.552.00	V	Rp. 140.552.00	V	Rp. 155.552.00	V	Rp. 170.552.00	V	Rp. 185.552.00	APBD	DINAS PP DAN PA



SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI 37122	INOVASI	TARGET KINERJA/ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
S.3.2.1. Meningkatkan kualitas SDM, lembaga dan kuantitas sarana prasarana untuk pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan	1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Kab/Kota	1.Lembaga penyedia layanan bagi keluarga dalam mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	"PECAH PUSPAGA" Pelayanan Pembinaan Pranikah Calon Pengantin di PUSPAGA	1.650 2. 3. ...	Rp. 90.000.0 00	1.700 2. 3. ...	Rp. 95.000.0 00	1.800 2. 3. ...	Rp. 105.000. 000	1.900 2. 3. ...	Rp. 150.000. 00	1.1000 2. 3. ...	Rp. 200.000. 00	APBD	DINAS PP DAN PA	
S.3.3.1. Meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal kepada korban kekerasan	Pendampingan UPTD PPA	Presentase pelayanan kepada korban kekerasan	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	APBD	DINAS PP DAN PA	
S.3.4.1. Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	1.Program Penanggulangan Bencana	1.Persentase Jumlah Penduduk yang memperoleh informasi rawan bencana	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	APLIKASI SI ANDINI (SISTEM INFORMASI PERINGATAN DINI)	100%	500.000. 000	100%	500.000. 000	100%	500.000. 000	100%	500.000. 000	100%	500.000. 000	APBD	BPBD	
S.3.5.1. Pemenuhan SDM yang berkualitas	Penguatan Kapasitas Mitigasi Bencana	1.Persentase Jumlah Penduduk yang memperoleh informasi rawan bencana	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	APLIKASI SI ANDINI (SISTEM INFORMASI PERINGATAN DINI)	100%	500.000. 000	100%	500.000. 000	100%	500.000. 000	100%	500.000. 000	100%	500.000. 000	APBD	BPBD	
S.3.5.2. Sarana Prasarana yang memadai	Program pencegahan dan kesiapsiagaan	1.Persentase Jumlah Penduduk yang memperoleh informasi rawan bencana	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	APLIKASI SI ANDINI (SISTEM INFORMASI PERINGATAN DINI)	100%	500.000. 000	100%	500.000. 000	100%	500.000. 000	100%	500.000. 000	100%	500.000. 000	APBD	BPBD	

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023



**5.4. PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART LIVING***

**Tabel 5. 4**

**Peta Jalan *Smart Living* Kota Kotamobagu**

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI 37122	INOVASI	TARGET KINERJA/ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Lv.1. Harmonisasi Tata Ruang	Lv.1.1.1. Mewujudkan harmonisasi lingkungan dan infrastruktur yang handal	Pengembangan Layanan Pengendalian dan Pemantauan Alat Penerangan Jalan	Terintegrasinya Sistem pengendalian dan pemantauan alat penerangan jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	DISHUB
	Lv.1.1.2. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya Jumlah Unit Tidak Layak Huni (%)	-	-	1,91	1750000 00	1,89	1750000 00	1,88	1750000 00	5,68	525000 000	5,68	5250000 00	APBD	PERKIM
Lv.2. Sarana/Prasarana Kesehatan	Lv.2.1.1. Pemenuhan akses dan informasi kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Peningkatan Website dan Media Sosial Dinas Kesehatan Kotamobagu sebagai media promosi dan informasi layanan kesehatan	4	80.500.0 00	4	82.000.0 00	4	83.500.0 00	4	85.000. 000	4	86.500.0 00	APBD	Dinas Kesehatan
					SiCANTIK CLOUD												



SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI 37122	INOVASI	TARGET KINERJA/ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Lv.3. Sarana/Prasarana Transportasi	Lv.3.1.1. Pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota 2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota 3. Pengelolaan terminal penumpang tipe C 4. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir 5. Pengujian berkala kendaraan bermotor 6. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	1. Jumlah dokumen rencana induk 2. Jumlah Perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota 3. Jumlah Terminal penumpang tipe C yang di kelola 4. Jumlah penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir 5. Jumlah Pengujian Berkala kendaraan bermotor 6. Jumlah Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	1.Persentase kendaraan yang terdaftar di kota yang merupakan kendaraan rendah emisi 2.Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem pembayaran elektronik	E-KIR KOTAMOBAGU (Uji Kendaraan Bermotor Elektronik)	1. 1.1 Dokumen 2. 623 unit 3. 1 Dokumen 4. 2 Dokumen 5. 2.566 Unit 6. 2 Dokumen	1. 354.118.600 2. 2.017.600.000 3. 50.000.000 4. 294.720.200 5. 632.500.000 6. 289.000.000	1. - 2. 625 Unit 3. - 4. 3 Dokumen 5. 2.688 Unit 6. 2 Dokumen	1. - 2. 2.066.600.000 3. - 4. 3 Dokumen 5. 494.720.200 6. 745.625.000 7. 489.000.000	1. - 2. 639 Unit 3. - 4. 3 Dokumen 5. 2.819 unit 6. 2 Dokumen	1. - 2. 2.144.050.000 3. - 4. 3 Dokumen 5. 494.720.000 6. 748.900.000 7. 35.000.000	1. - 2. 639 Unit 3. - 4. 3 Dokumen 5. 2.819 unit 6. 2 Dokumen	1. - 2. 2.144.050.000 3. - 4. 3 Dokumen 5. 494.720.000 6. 748.900.000 7. 35.000.000	1. - 2. 639 Unit 3. - 4. 3 Dokumen 5. 2.819 unit 6. 2 Dokumen	1. - 2. 2.144.050.000 3. - 4. 3 Dokumen 5. 494.720.000 6. 748.900.000 7. 35.000.000	APBD	DISHUB

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023



**5.5. PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART ECONOMY**

**Tabel 5. 5**

**Peta Jalan Smart Economy Kota Kotamobagu**

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI 37122	INOVASI	TARGET KINERJA/ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Ec.1. Industri Berdaya Saing	Ec.1.1.1. Inovasi berbasis penelitian, Pendekatan berbasis ekosistem, pengembangan SDM terpadu, Meningkatkan kualitas pemasaran dan pengelolaan produk dengan membangun sentra-sentra industri, serta memaksimalkan penggunaan teknologi digital	Pengembangan informasi lapangan kerja yang mudah diakses, diadakannya pelatihan ketenagakerjaan, program pemagangan serta dilaksanakannya jobfair	1. Tersediannya informasi lapangan kerja yang mudah di akses, 2. diadakannya pelatihan ketenagakerjaan, program pemagangan 3. Melaksanakan jobfair	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	SINDIRELA (SISTEM INFORMASI INDUSTRI DAN KETENAGA KERJAAN)	1. 1 aplikasi WEB Informasi ketenagakerjaan 2. 50 Orang yang mengikuti Pelatihan dan pemagangan 3. Terlaksananya jobfair	-	1. adanya 50 informasi lowongan kerja 2. 50 Orang yang mengikuti Pelatihan dan pemagangan 3. Terlaksananya jobfair	-	1. adanya 50 informasi lowongan kerja 2. 50 Orang yang mengikuti Pelatihan dan pemagangan 3.	-	1. adanya 50 informasi lowongan kerja 2. 50 Orang yang mengikuti Pelatihan dan pemagangan 3. Terlaksananya jobfair	-	1. adanya 50 informasi lowongan kerja 2. 50 Orang yang mengikuti Pelatihan dan pemagangan	-	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2. Membangun sentra-sentra industri dan memaksimalkan penggunaan teknologi digital dalam melakukan promosi Produk Usaha	1. adanya sentra pengolaan industri 2. Meningkatnya produk yang tersertifikasi 3. terciptanya claster Industri Kecil Menengah 4. meningkatnya pemahaman pelaku IKM dalam penggunaan aplikasi-aplikasi marketplace yang ada ...	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	SINDIRELA (SISTEM INFORMASI INDUSTRI DAN KETENAGA KERJAAN)	1. adanya sentra industri yang dibangun 2. terlaksananya pelatihan bagi pelaku IKM ...	-	1. Adanya 10 produk baru yang tersertifikasi 2. adanya 1 claster industri 3. terlaksananya pelatihan bagi pelaku IKM ...	-	1. Adanya 10 produk baru yang tersertifikasi 2. adanya 1 claster industri 3. terlaksananya pelatihan bagi pelaku IKM ...	-	1. Adanya 10 produk baru yang tersertifikasi 2. terlaksananya pelatihan bagi pelaku IKM ...	-	1. Adanya 10 produk baru yang tersertifikasi 2. terlaksananya pelatihan bagi pelaku IKM ...	-	APBN dan APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI 37122	INOVASI	TARGET KINERJA/ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Ec.2. Kesejahteraan Masyarakat	Ec.2.1.1. Percepatan pengurangan jumlah penduduk miskin	Mengintegrasikan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan memakai data angka kemiskinan yang valid yang berasal dari satu sumber	1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	5.4. Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan	-	V	345.000.000	V	345.000.000	V	345.000.000	V	345.000.000	V	345.000.000	APBD	
Ec.3. Transaksi Keuangan	Ec.3.1.1. Penerapan penggunaan dompet digital / <i>fintech</i>	Memasyarakatkan pembayaran secara digital/ <i>fintech</i> pada penjual-penjual lokal	1. Terlaksananya sistem pembayaran secara digital melalui <i>fintech</i>	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	Sosialisasi pembayaran melalui <i>fintech</i> di media sosial	V	112.000.000	V	112.000.000	V	112.000.000	V	112.000.000	V	112.000.000	APBD	

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023



**5.6. PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART ENVIRONMENT**

**Tabel 5. 6**

**Peta Jalan Smart Environment Kota Kotamobagu**

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI 37122	INOVASI	TARGET KINERJA/ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
En.1. Perlindungan Lingkungan Hidup	En.1.1.1. Penguatan pengawasan dan penindakan pencemaran lingkungan secara kolaboratif	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Persentase Lokasi Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - 2. Persentase Lokasi Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara jarak jauh langsung 2. Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau 3. Persentase bangunan umum yang dilengkapi untuk memantau kualitas udara dalam ruangan	Aplikasi IKLH ppkl.menhk.go.id website Dlh.kotakotamobagu.go.id	V	579797240	V	619776935	V	719776935	V	-	V	-	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
En.2. Pengelolaan Sampah dan Limbah	En.2.1.1. Optimalisasi pengelolaan daur ulang sampah dan pemanfaatan zero waste	1. Program Pengelolaan Persampahan-Kegiatan Pengelolaan Sampah	1. Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah Perkotaan yang Tertangani - Volume sampah yang Tertangani	1. Terlaksananya Pengangkutan Sampah Perkotaan yang Tertangani	-	V	802000000	V	848500000	V	1014000000	V	-	V	-	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
		2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang terselesaikan	1. Terlaksananya Pengangkutan Sampah Perkotaan yang Tertangani	kotaBISA (Kotamobagu bersih, indah, Sanitasi Aman)	100	900.246.000	100	1.320.000.000	100	1.395.000.000	100	-	V	-	APBD	Bappelitbang da



SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI 37122	INOVASI	TARGET KINERJA/ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
En.3. Tata kelola Energi	En.3.1.1. Pengembangan energi alternatif	1. Pelaksanaan pengembangan energi ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah/sampah biogas menjadi gas metan	1. volume limbah sampah yang masuk ke TPA setiap tahun dalam persen	1. Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilkan energi 2. Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota	Pengelolaan Limbah Sampah Menjadi Energi Gas Metan	V	97.43	V	97.50	V	97.60	V	-	V	-	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023



**6**  
**BAB**

## **PENUTUP**

Buku 2 *Masterplan Smart City Kota Kotamobagu* merupakan gambaran faktual dari Kota Kotamobagu yang dijabarkan melalui kondisi wilayah yang berkaitan dengan potensi serta masalah dari Kota Kotamobagu. Potensi dan masalah tersebut kemudian disinkronkan dengan rencana pembangunan Kota Kotamobagu yang dituangkan ke dalam rencana aksi yang terdiri dari kebijakan dan kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan software serta literasi sebagai pendukung dari program-program inovasi yang telah diajukan. Dalam melaksanakan program *smart city* secara bertahap selaras dengan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023, maka dirumuskan melalui peta jalan (*road map*) dalam jangka pendek 3 tahun, jangka menengah 5 tahun dan jangka panjang 10 tahun. Selanjutnya untuk memberikan akselerasi pengembangan *smart city*, maka ditentukan *quick wins* yang ditetapkan dalam jangka 1 tahun dengan melaksanakan sebagian dari program jangka pendek.

Penyusunan buku 2 *Masterplan Smart City Kota Kotamobagu* diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan perkotaan maupun wilayah *hinterland* di Kota Kotamobagu selama 10 tahun ke depan. Hal terpenting dari buku ini yaitu dapat menjawab tantangan perkotaan yang semakin lama akan semakin kompleks sehingga dibutuhkan inovasi dan kolaborasi yang terus menerus dalam meningkatkan kualitas dokumen *Masterplan Smart City* Kota Kotamobagu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. (2018). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2019.
- Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. (2014). Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu Tahun 2014-2034.
- Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. (2018). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu 2018-2023.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Provinsi Sulawesi Utara dalam Angka 2023.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Kota Kotamobagu Angka 2023.
- Badan Standardisasi Nasional. (2019). Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan – Indikator untuk kota cerdas (ISO 37122:2019, IDT).
- Biro Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021, February 23). Kesesuaian NSPK Program/Kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). Buku Panduan Penyusunan *Masterplan Smart City* - Gerakan Menuju *Smart City*.
- Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 2020.
- Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). Buku Panduan Penyusunan *Masterplan Smart City* - Gerakan Menuju *Smart City*.
- Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 2020.
- Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- <https://binus.ac.id/2020/12/kontribusi-program-smart-city-untuk-pengembangan-daerah-di-masa-depan/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 20.45 WIB.



<https://ilmu.lpkn.id/2021/02/10/menju-kota-dengan-konsep-smart-city/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2023, pukul 17.00 WIB.

<https://setkab.go.id/pemerataan-kesejahteraan-rakyat/> diakses pada tanggal 28 Agustus 2023, pukul 23.00 WIB.